



ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

EDISI OKTOBER-DESEMBER 2021

GAUNG AMAN

Media Informasi & Komunikasi Masyarakat Adat

Vaksin untuk
Masyarakat Adat

Di Balik Sengketa
Wilayah Adat Marafenfen

**ADAPTASI & INOVASI
MASYARAKAT ADAT**



Susunan Redaksi

Penanggung Jawab
Sekretaris Jenderal AMAN
Rukka Sombolinggi

Pimpinan Umum
Deputi I Sekjen AMAN
Urusan Organisasi
Eustobio R. Renggi

Pemimpin Redaksi
Nurdiyansah Dalidjo

Sekretaris Redaksi
Titi Pangestu

Desain & Tata Letak
Taqi

Redaksi & Kontributor
Jakob Siringoringo, Rainny Situmorang, Muhammad Arman, Mina Susana Setra, Monang Arifin Saleh, Erasmus Cahyadi, Abdi Akbar, Alfa Gumilang, Chresly Vikario, Anas Radin Syarif, Giat Perwangsa, Devi Anggraini, Akbar Winaya, Yayan Hidayat, Rosa'adah, Simon Welan, dan Ilham Saifulloh

Distribusi
Jeki Angkat & Awaluddin
(Direktorat OKK)

Alamat Redaksi

Rumah AMAN
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820

Telepon/Faks

(021) 829 7954/837 06282

Surat Elektronik

rumahaman@cbn.net.id

Facebook

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Twitter

@RumahAMAN

Instagram

@rumah.aman

YouTube

AMAN - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara -

Podcast Radio Gaung AMAN

Situs : www.radio.aman.or.id
Sinar Spotify : Radio Gaung AMAN

Portal Berita AMAN.or.id

www.aman.or.id

Foto sampul merupakan dokumentasi AMAN yang menggambarkan potret kedaulatan pangan pada Masyarakat Adat Kasepuhan, di mana ritual Serentaun dirayakan setiap tahunnya sebagai puncak panen raya di wilayah adat.

	Adaptasi & Inovasi Masyarakat Adat	2
	Vaksin untuk Masyarakat Adat	5
	Vaksin Versi Masyarakat Adat Papua di Kampung	10
	Di Balik Sengketa Wilayah Adat Marafenfen	12
	Hentikan Kekerasan terhadap Masyarakat Adat Rendu	15
	Meneruskan Seni dan Budaya Osing Lewat Sekolah Adat	18
	Cara Baso Memperkuat Resiliensi Masyarakat Adat	20
	BPAN Gelar Kemah Raya	22
	Kekuatan Perempuan Adat di Masa Krisis	24
	Merayakan 14 Tahun UNDRIP	27
	Upaya Berdaulat Pangan Masyarakat Adat Montong Baan	30
	Prioritas Vaksinasi bagi Masyarakat Adat	32
	Partisipasi Aktif Masyarakat Adat dalam Program Vaksinasi	36
	Mari Bergabung di CU Randu!	39
	Transparansi Publik	41

Redaksi Majalah Gaung AMAN menerima sumbangan atau kontribusi tulisan berupa berita, artikel, feature, dan foto seputar Masyarakat Adat. Kami memprioritaskan kontribusi dari penulis warga adat (komunitas adat anggota AMAN). Silahkan menghubungi sekretaris redaksi kami pada infokom@aman.or.id atau kontak Rumah AMAN untuk mengetahui tema pada edisi selanjutnya maupun pengiriman tulisan dan/atau foto.



Adaptasi & Inovasi Masyarakat Adat

Pada edisi sebelumnya, kita telah membahas potret dan pembelajaran Masyarakat Adat yang Tangguh di tengah-tengah krisis selama pandemi. Berangkat dari situ, kita harus mulai bicara tentang adaptasi dan inovasi.

Masyarakat Adat selama ini mengalami kekerasan dan perampasan wilayah adat. Tapi, di tengah krisis ini, kita terbukti tangguh karena gotong royong dan musyawarah. Kita juga memperketat pengamanan atas kampung melalui karantina secara mandiri dan bermartabat. Di berbagai tempat, para pemuda adat dan perempuan adat semakin aktif bergerak. Berdiri di garis depan dalam gerakan kedaulatan pangan. Selain ladang-ladang yang Kembali dan terus ditanami, kita telah menyaksikan berbagai kreasi dan inovasi, mulai dari pembuatan hand sanitizer dari alkohol lokal sampai optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka konsolidasi secara daring. Demikian juga dengan kebangkitan dan menguatnya ritual dan pengobatan tradisional. Kita telah menyaksikan sendiri bagaimana kita sebagai Masyarakat Adat berproses menghadapi pandemi ini lewat serangkaian adaptasi dan inovasi.

Kita perlu menyadari bahwa kapasitas kita secara tradisional itu tidak selalu memadai. Covid-19 varian Delta misalnya, telah menunjukkan bahwa resiliensi tidak mutlak dan ada ambang batasnya. Kapasitas sistem yang kita miliki dan perkuat, telah hampir runtuh karena mutasi virus tersebut. Maka, kita harus membuka diri untuk bisa beradaptasi dan menghadirkan inovasi untuk semakin memperkuat pengetahuan, praktek dan sumber daya warisan leluhur.

Selain inovasi ilmu dan teknologi (untuk kita bisa terus produksi vitamin yang cukup), pangan, serta komunikasi dan informasi, kini kita dihadapkan pada inovasi vaksin. Vaksin adalah inovasi. Ketahanan kita di kampung, tidak membuat kita kebal pada virus. Sejarah sudah menunjukkan bahwa banyak Masyarakat Adat yang punah justru karena kedatangan penyakit baru yang dibawa oleh orang-orang baru dari luar wilayah adat, termasuk mereka yang membawa virus, seperti misionaris, penambang, pedagang dll. Bahkan ada Masyarakat Adat yang hidup dalam situasi voluntary isolation (isolasi sukarela), di mana Masyarakat Adat secara sengaja mengisolasi diri karena kekhawatiran pada kepunahan karena tidak mempunyai sistem pertahanan kuat terhadap penyakit-penyakit asing.

Majalah Gaung AMAN mengeksplorasi perihal adaptasi dan inovasi Masyarakat Adat yang sedang membangun suatu tatanan baru. Tentu saja, pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat adalah pula bagian dalam memastikan Masyarakat Adat menjaga bumi dan umat manusia serta menghadirkan solusi pada berbagai tantangan.

Selamat membaca!

Rukka Sombolnggi

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara





Gerai Nusantara
Rumahnya Produk Masyarakat Adat



tenun nusantara X

Sebagai rumahnya Masyarakat Adat, Gerai Nusantara menghadirkan produk-produk unggulan yang dihasilkan komunitas anggota AMAN serta berbagai produk inovatif untuk menunjang penampilan etnik kamu.

Berbagai motif tenun Nusantara juga bisa menjadi buah tangan untuk event yang kamu gelar. Dengan sistem *pre-order*, produk *pouch*, *notebook*, *tote bag* maupun *sling bag* unik dari kami tersedia sebagai paket *goodie bag* yang bisa dibagikan ke para peserta. Ditambah dengan adik kandung kami yaitu Nusantara Indigenous Coffee yang akan menjadikan event kamu lebih bersemangat.

Silakan kontak kami untuk *minimum order* dan harga paket-paket yang kami tawarkan, termasuk kopi NIC. Dan dukung terus produk-produk Masyarakat Adat Nusantara ya!

find us

www.gerainusantara.com

Store: Jl. Jend. Sudirman No.15F, RT.01/RW.03, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 (*on appointment only*)

 [gerainusantara_aman](https://www.instagram.com/gerainusantara_aman)  0811113237 – Susi

Portal Berita **AMAN.or.id**

■ Jurnalisme berperspektif Masyarakat Adat

Simak perkembangan terkini dari berbagai peristiwa dan kisah seputar Masyarakat Adat di Nusantara melalui Portal Berita AMAN.or.id.





Vaksin untuk Masyarakat Adat

Wawancara dengan Rukka Sombolinggi



Sejak Covid-19 masuk ke Indonesia, Masyarakat Adat telah melakukan respon cepat dalam mengantisipasi penyebaran virus. Nyaris tak ada kasus yang ditemukan di komunitas adat ketika Covid-19 merebak di awal dan pertengahan 2020. Namun, dengan semakin memburuknya situasi dan hadirnya varian virus baru, pertahanan Masyarakat Adat menghadapi tantangan.

Selain terus memperkuat penerapan protokol kesehatan dan pembatasan sosial, pemerintah juga menggencarkan distribusi vaksin. Program vaksinasi merupakan langkah penting untuk menekan laju penularan, menyelamatkan nyawa, dan mencapai kekebalan kelompok. Tapi, upaya menuju capaian tersebut tersandung Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi, khususnya terkait pasal yang mewajibkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat mengikuti program vaksinasi.

Majalah Gaung AMAN menghadirkan wawancara Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi di Berita Satu (12/8/2021) serta pandangan AMAN terhadap vaksin melalui berbagai pidatonya.

Situasi Masyarakat Adat

Berbagai macam cara dan strategi yang dilakukan Masyarakat Adat dalam membentengi diri dari gempuran virus di wilayah adat, telah cukup efektif. Namun, kehadiran virus korona varian Delta yang menyebar begitu cepat dan mematikan, membuat Masyarakat Adat kewalahan hingga pertahanan itu jebol. Tentu saja, ada sebab lain yang menyertai.

"Keunggulan kita menjadi sumber kerentanan kita," kata Rukka pada pidato Perayaan Hari Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) (9/8/2021). Menurutnya, wilayah adat yang telah dijaga, tidak lepas dari ancaman perampasan wilayah adat di tengah pandemi. "Saudara-saudara kita di Sakai, Riau yang ditetapkan sebagai Masyarakat Adat terancam punah, selama pandemi ini bisa panen. Tapi yang terjadi, kebun dan tanaman buah mereka dihancurkan bulldoser perusahaan. Aparat dan pemerintah diam saja."

Pada Catatan Akhir Tahun, AMAN mendata sedikitnya 40 kasus kekerasan dan kriminalisasi Masyarakat Adat. Rukka menegaskan bahwa di lapangan, ada lebih banyak kasus yang terjadi dan tak pernah dilaporkan. Sehingga, jumlah kasus tahun lalu itu merupakan fenomena gunung es. Sementara itu, berbagai kasus besar terjadi di mana-mana, termasuk Masyarakat Adat Kinipan di Kalimantan Tengah, Masyarakat Adat Agabag di Kalimantan Utara, Masyarakat Adat Toruakat di Sulawesi Utara, Masyarakat Adat Batak di Sumatera Utara, Masyarakat Adat Marafenfen di Maluku, Masyarakat Adat Rendu di Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain.

Pemberian APD dan masker ke Puskesmas oleh Masyarakat Adat Osing di Banyuwangi





"Wilayah adat yang dekat dengan perusahaan tambang atau sawit," ungkap Rukka dalam menjawab pertanyaan terkait lokasi Masyarakat Adat yang terkonfirmasi Covid-19. "Masyarakat Adat mau lockdown pun tak mungkin karena wilayah adat itu jadi lintasan 24 jam operasi perusahaan. Tahun lalu, kami minta mereka berhenti dulu sementara. Permukiman wilayah adat juga jadi permukiman pekerja perusahaan atau Masyarakat Adat jadi pekerja di perusahaan."

Selain klaster perusahaan, Rukka menyinggung dengan apa yang disebutnya sebagai klaster ekonomi dan klaster ASN (Aparatur Sipil Negara). Klaster ekonomi terjadi dengan adanya aktivitas masuknya pedagang dari kota ke kampung atau warga di kampung yang harus pergi ke kota untuk menjual hasil bumi, sedangkan klaster ASN terjadi lewat interaksi di antara para pegawai institusi pemerintah.

Sementara itu, menyoal program vaksinasi yang digalakkan pemerintah secara masif, AMAN mengkritik bahwa persyaratan NIK - dengan nama dan alamat - menyulitkan Masyarakat Adat yang tidak mempunyai NIK atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), di mana NIK tercantum pada KTP. Alasan banyak Masyarakat Adat sampai sekarang belum memiliki NIK, disebabkan masalah birokrasi, minimnya atau ketiadaan infrastruktur penunjang, dan hambatan kultural, termasuk diskriminasi dan stigma bagi Masyarakat Adat dalam mengurus dokumen di kantor pemerintahan.

Menurut data AMAN per 21 Juli 2021, hanya terdapat 468.963 orang yang mendaftarkan diri untuk program vaksinasi dan sekitar 20 ribu dari mereka sudah mendapatkan vaksin tahap pertama. Padahal, perkiraan jumlah Masyarakat Adat yang tersebar di Indonesia, mencapai 40-70 juta jiwa, di mana hampir 20 juta orang di antaranya terdaftar sebagai anggota AMAN.

"Kita harus meletakkan vaksin sebagai hak warga negara," ucap Rukka. "Dalam konteks kepentingan umum, itu menjadi kewajiban setiap individu untuk melindungi orang sekitar. Terkait Masyarakat Adat, dari awal, sosialisasi tentang vaksin hampir tak ada yang menjangkau kampung-kampung. Yang diterima Masyarakat Adat, adalah berita-berita yang muncul dari sumber yang selama ini bukan sumber informasi resmi. Bahan sosialisasi ada, tapi tidak sampai ke kampung-kampung. Dan ini kalah dari serbuan informasi di luar Kementerian Kesehatan.... Terkadang, kita mengamini sikap yang terus menyalahkan Masyarakat Adat, - dianggap bodoh dan tak bisa pilah informasi - padahal informasi yang sampai ke Masyarakat Adat itu jauh lebih provokatif dan menarik caranya, tapi tak pernah sebutkan bahwa itu hoaks."



Vaksinasi bagi Masyarakat Adat Osing



Dan di tengah ketiadaan fasilitas kesehatan dan gempuran Covid-19, kampung-kampung tak punya pilihan selain pengobatan tradisional dan ritual. Itulah yang diungkapkan Rukka turut memunculkan rasa percaya diri yang cukup berlebihan.

"Dites tidak mau karena dikatakan Covid-19 biasa dialami," lanjut Rukka. "Meski kampung mengalami gejala seperti Covid, tidak bisa dibuktikan karena tidak ada tes. Ketika ditanya mengapa tak mau vaksin? Karena seumur hidup tak pernah kena jarum. Ternyata, masih banyak anak adat itu imunisasi saja belum. Jadi, banyak sekali sejarah penyingkiran, bahwa Masyarakat Adat itu banyak tertinggal, bahkan ketika wilayah adat jadi jaminan atas pembangunan yang selama ini merusak."

Keterbatasan informasi, akses vaksinasi, dan perkara NIK turut menjadi penghalang bagi Masyarakat Adat mengikuti program vaksinasi, terutama mereka yang tinggal di sekitar kawasan hutan maupun pulau kecil dan perbatasan.

Terobosan dalam Akses Vaksin

Di tengah kondisi yang kompleks, khususnya dengan peredaran berita bohong yang terlanjur masuk kampung tanpa diiringi penyebaran informasi yang benar, tentu menjadi tak adil untuk menyalahkan Masyarakat Adat yang seolah menolak vaksin. Rukka menegaskan bahwa sosialisasi amat penting. Sejak awal, AMAN telah mendesak pemerintah untuk melakukan testing (tes Covid-19), tracing (penelusuran kontak erat), dan treatment (tindak lanjut pada perawatan) yang diikuti dengan penguatan Puskesmas dan/atau Puskesmas Pembantu (Pustu) mengingat keterbatasan dan bahkan ketiadaan akses kesehatan dan layanan medis di kampung.

"Di berbagai tempat, Masyarakat Adat mau membuka diri untuk divaksin," lanjut Rukka. "Tapi, di beberapa tempat lain yang sudah menerima berita salah bahwa vaksin ini jahat, itu sudah susah dan harus ada perlakuan khusus. Sekarang ini, sudah hampir 400 ribu orang yang minta vaksin. Ini sudah kami komunikasikan dengan Polri dan Kemenkes untuk pastikan bahwa ketika infrastruktur vaksinasi sudah ada dan ada masyarakat yang siap, pastikan vaksin ada."

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi yang ditunjuk sebagai juru bicara vaksinasi Covid-19, menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan sistem informasi untuk memastikan akuntabilitas vaksinasi. "Masyarakat yang tak punya NIK bisa dilakukan vaksinasi selama bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Proses itu, ada tambahan meja dalam hal administrasi kependudukan dan akan dapat NIK dari Dinas Dukcapil. Itu sudah kita titipkan melalui Pemda dan camat untuk terhubung dengan pemangku adat."

Namun, Rukka menegaskan bahwa persoalan bukan hanya dalam urusan vaksin, tapi status Covid-19. "Aktivasi Puskesmas, Pusu, atau dokter untuk masuk kampung," respon Rukka. "Jadi, screening itu bukan hanya soal status kesehatan, tapi disertai dengan testing dan swab yang perlu diperbanyak." Ia mengkritik tentang keterlambatan mendapat hasil tes, sehingga penelusuran dan tindak lanjut perawatan ikut telat. "Banyak kasus orang keluar hasil swab-nya itu sudah mati sebab lambat. Fasilitas daerah tidak ada. Ini soal akses!"



AMAN Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, TNI/Polri, dan berbagai aparat dari pemerintah setempat dalam melakukan kegiatan vaksinasi bagi Komunitas Masyarakat Adat Tajio.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Masyarakat Adat Sekadau, Kalimantan Barat, menyambut kedatangan tenaga kesehatan yang melakukan aksi jemput bola dengan datang ke kampung-kampung dalam penyelenggaraan vaksin.

Sejak awal pandemi, AMAN telah melakukan respon tanggap darurat di kampung-kampung lewat pembentukan Satgas #AMANKanCovid19 dan melakukan komunikasi secara persuasif dengan pemerintah.

"Ada inisiatif dari kampung secara gotong royong yang harusnya diadopsi. Jadi jangan paksakan kebijakan dari pusat," ungkap Rukka. "Apa yang kita bayangkan dari pusat, itu tak seperti terjadi di lapangan! Ada kampung yang kita dengar sudah ada gejala Covid-19 berjamaah, tapi tak ada pemeriksaan. Jadi, kami andalkan pada obat tradisional. Ada yang ke hutan untuk bisa sembuhkan diri."

Berbagai adaptasi dan inovasi dalam upaya mengatasi dan menangani Covid-19, juga dilakukan Masyarakat Adat. Dan seharusnya, dengan berkaca pada situasi yang kian memburuk pasca-Lebaran 2021, pemerintah perlu lebih fleksibel dalam merespon situasi secara cepat.

"NIK itu bukan kewajiban masyarakat, tapi hak masyarakat dan kewajiban negara," ujar Sekjen AMAN. "Dalam situasi sekarang ini, sudah ada solusi tak perlu pakai NIK, katanya Dukcapil jemput bola. Jadi, kerja sama Dukcapil jangan diterjemahkan serigid itu sebab harus pertimbangkan wilayah dan logistik. Yang sederhana, data yang tak punya NIK, cukup diberikan daftarnya oleh kepala desa: nama, umur, alamat untuk ditindaklanjuti. Dukcapil terima itu dan tak perlu keluar uang dan proses itu bersama kepala desa."

Menurut Rukka, di tengah ketiadaan UU Masyarakat Adat, Masyarakat Adat digempur pula oleh UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang digunakan sebagai instrumen hukum untuk meneguhkan perampasan wilayah adat.

"Kita lihat di tengah situasi bertahan terhadap pandemi, ada kisah soal ramuan tradisional dan pangan serta perampasan wilayah adat dan kriminalisasi," tegasnya. "Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk berjuang mempertahankan tanah leluhur kita, bergotong royong melawan gempuran Covid-19, memperjuangkan kontrak sosial baru untuk pastikan kita tak ada di belakang. Kita menjadi sentral dari sebuah dunia dengan tatanan baru. Masyarakat Adat punya lebih dari cukup untuk kita tawarkan pada seluruh umat manusia."

Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi pun mengatakan bahwa apa yang dimiliki oleh Masyarakat Adat, bukan hanya diperuntukkan bagi Masyarakat Adat, melainkan bagi generasi berikut dan seluruh umat manusia.

Silahkan simak berbagai pidato, ceramah, maupun obrolan (tanya-jawab) dengan Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi lewat Portal Berita AMAN.or.id, Podcast Radio Gaung AMAN pada Spotify atau www.radio.aman.or.id, dan YouTube "Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)."

TUTUP TPL





Vaksin Versi Masyarakat Adat Papua di Kampung

Oleh Maria Baru



Maria Baru.
Sumber foto:
Dokumentasi pribadi.

Covid-19 masuk ke Tanah Papua, khususnya wilayah Sorong Raya, pada pertengahan Maret 2020. Kala itu, masyarakat dihebohkan dengan virus yang menyebar cepat dan mematikan. Hal tersebut membuat masyarakat takut dan kepanikan. Sebagian yang tinggal dan bekerja di kawasan perkotaan, akhirnya memilih pulang, terutama

Masyarakat Adat Papua yang berasal dari Maybrat, Sorong, dan Tambrau di Papua Barat. Mereka berbondong-bondong ke kampung. Mereka juga kembali ke dusun sagu atau ke kebun. Mereka bertani dan juga menebang sagu selama tiga sampai empat, bahkan enam bulan.

Beyum Antonela Baru adalah salah satu perempuan adat yang kemudian memilih tinggal di kampung selama pandemi. Sebelumnya, ia tinggal di Kota Sorong dan kini menetap di Distrik Mare, Kabupaten Maybrat. Di sana, ia terlibat dalam pengembangan minyak sereh wangi bersama mama-mama.

Beyum mewakili warga yang menolak divaksin. Menurutnya, masyarakat sekarang menganggap bahwa virus korona bukan sesuatu yang berbahaya dan menakutkan seperti yang selama ini ditampilkan di berita-berita yang disebar oleh pemerintah setempat. Ia menilai kalau Masyarakat Adat percaya pada bahan makanan yang telah disediakan oleh alam Papua, menjadi vitamin kuat yang bisa digunakan untuk melawan Covid-19. Makanan lokal yang telah disediakan alam dan ditanam oleh Masyarakat Adat di kampung, baginya, merupakan obat yang menambah imun tubuh.

"Sayur gedi, daun pepaya, pakis, ikan, daging babi, rusa, dan papeda itu semacam antibodi-nya masyarakat di kampung," ujarnya. "Tong (kami) makan papeda panas-panas. Tong keringatan. Ingus keluar. Itu 'kan papeda panas masuk cuci paru-paru, kotoran, virus yang tahan sebentar di kerongkongan. Vaksin yang sekarang dikampanyekan adalah vaksin buatan manusia dan sudah dicampur dengan bahan kimia. Tong juga tra (tidak) tahu vaksin terbuat dari bahan apa. Kalau bahan alami dan organik yang ada di sekitar kita, ramah untuk tubuh. Kita pakai produk asli saja daripada disuntik-suntik. Kita percaya Tuhan Allah menciptakan kita. Dia sudah kasih kita antibodi. Kenapa kita buat antibodi baru? Mending kita perkuat antibodi tubuh yang ada dengan makan makanan yang bergizi dan perketat protokol kesehatan," papar Beyum.

Ia berpandangan bahwa virus korona tidak menyerang antibodi, sehingga bukan vaksin yang seharusnya dikampanyekan, tapi Pemerintah Daerah harus kampanyekan masyarakat di kota dan kampung untuk tetap menjaga imun tubuh melalui pola makan dan kehidupan sehari-hari serta menjaga protokol kesehatan.

"Jangan kampanye vaksin lebih kencang, tapi pemerintah kampanyekan kepada masyarakat untuk makan makanan yang bergizi, menjaga pola hidup yang sehat, mematuhi protokol kesehatan! Itu yang terpenting." Meski begitu, Beyum tetap meminta agar pemerintah setempat mengampanyekan agar masyarakat kembali berkebun dan pemerintah bantu menyiapkan bibit sayur. "Tong pu (punya) makanan lokal dengan nilai gizi yang tinggi," tambahnya.

* Penulis adalah Orang Asli Papua dari Kabupaten Tambrau, Papua Barat dan jurnalis Suara Papua.



Jangankan ke kampung-kampung, menurut saya kegiatan vaksin di Kota Sorong selama ini pun belum ada edukasi dan sosialisasi yang efektif hingga ke bawah untuk menjangkau masyarakat di akar rumput. Kegiatan yang kerap dilakukan juga tidak berkelanjutan. Misalnya, saat kasus Covid-19 naik, baru buat kampanye. Selain sosialisasi yang kurang, banyak informasi, seperti video atau berita hoaks, yang justru lebih cepat merebak ke masyarakat ketimbang gerakan edukasi vaksin. Maka, tanpa dukungan vaksin yang belum sampai ke akar rumput, banyak masyarakat takut.

Doktrin agama juga kuat. Ada anggapan yang seolah menyudutkan kalau kita malah lebih takut virus daripada Tuhan.

Saya sendiri melihat kegiatan vaksin massal yang pernah diselenggarakan, justru banyak diikuti oleh orang non-Papua. Sementara itu, partisipasi anak-anak sekolah (SMA) yang ikut vaksin juga bukan berangkat dari kesadaran, melainkan karena aturan dari pihak sekolah. Ketiadaan sosialisasi tentang vaksin yang efektif dan menyentuh akar rumput ini, bukan hanya berdampak ke masyarakat, bahkan ada pejabat yang enggan divaksin atau divaksin karena terpaksa.

Pada Juni lalu, ketika kasus Covid-19 sedang tinggi, saya melihat ada banyak warga yang sampai sakit-sakit itu memilih diam di rumah saja. Mereka berobat sendiri (tanpa didampingi oleh petugas kesehatan atau dokter) dan hanya mengonsumsi ramuan. Tak ada yang mau ke rumah sakit karena takut divonis positif korona. Ada dari mereka yang sampai meninggal, padahal belum tentu karena Covid-19.

Guntur Fonataba, seorang dokter muda dari Papua, mengungkapkan bahwa belum ada penelitian tentang pandangan masyarakat Papua terhadap vaksin. Menurut pengamatannya, masyarakat Papua - mulai dari kelas bawah, menengah, hingga atas - mempunyai pemahaman yang sama soal vaksin untuk mereka bisa mempunyai akses melakukan perjalanan jauh, bekerja, bersekolah, dan lainnya. Namun, kesadaran bahwa vaksin untuk melindungi diri dari virus, masih sangat minim.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap vaksin. Guntur menjelaskan kalau itu disebabkan oleh sebagian Orang Asli Papua yang Kristen konservatif, di mana ada yang mengaitkan vaksin atau korona dengan agama, sehingga masyarakat rata-rata belum divaksin sampai saat ini. Selain itu, ia juga menambahkan, ada pandangan lain yang mempengaruhi, yaitu berita-berita heboh dan hoaks mengenai orang yang meninggal itu dihubungkan dengan vaksin. Akhirnya, banyak Orang Asli Papua yang menarik diri untuk tidak mengikuti vaksin. Hal tersebut berdampak sampai pada Masyarakat Adat di akar rumput.

Tambahan lain lagi datang dari Dokter Mia Rumaterary. Ia menilai harus ada sosialisasi yang masif dan terus-menerus dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan petugas kesehatan karena sampai saat ini banyak masyarakat di Papua, khususnya Orang Asli Papua, telah dipengaruhi oleh informasi-informasi hoaks, sehingga mereka jadi takut mengikuti vaksin. Menurutnya, semua masyarakat Papua mau vaksin, namun tergantung bagaimana cara memberi pemahaman terhadap mereka.

Pendekatan dengan kelembagaan adat maupun pihak gereja, menjadi penting untuk menjangkau kalangan akar rumput hingga ke kampung-kampung.

Redaksi mengundang kawan aktivis, jurnalis, penulis, peneliti, dan akademisi untuk menulis esai pada kolom "Opini" tentang pandangan, hasil penelitian, atau kajian kritis yang mendukung gerakan Masyarakat Adat di Indonesia. Pengiriman naskah atau komunikasi lebih lanjut tentang tema, dapat menghubungi Nurdiyansah Dalidjo pada nurdiyansah@aman.or.id.



Di Balik Sengketa Wilayah Adat Marafenfen

Oleh Nurdiyansah Dalidjo



Aksi Masyarakat Adat Marafenfen di depan Kantor Pengadilan Negeri Dobo.

Sumber foto: Dokumentasi Masyarakat Adat Marafenfen.

Masyarakat Adat Marafenfen menuntut hak atas wilayah adat mereka yang diduga telah diserobot secara sepihak oleh pihak TNI Angkatan Laut (AL). Rencananya, bandara udara (bandara) dan berbagai fasilitas lainnya akan dibangun di atas ratusan hektar tanah yang berada di Desa Marafenfen, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

Tuntutan Masyarakat Adat pun berujung pada pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Dobo. Dilansir dari portal berita RII Ambon (rri.co.id/ambon, 18/5/2021), Surat gugatan yang didaftarkan dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob bertanggal 31 Maret 2021 itu, menggugat TNI AL, Gubernur Maluku, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas objek sengketa berupa tanah seluas 689 hektar.

Di Kota Ambon, puluhan pemuda adat yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Aru, melakukan aksi unjuk rasa dengan berjalan kaki dari lokasi Gong Perdamaian ke Kantor Gubernur Maluku dalam rangka mendukung perjuangan Masyarakat Adat Marafenfen. (13/9/2021) Para mahasiswa menuntut agar Gubernur Maluku segera mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor 591.1/SK/50/92 bertanggal 22 Januari 1992 yang menjadi dasar pembuatan sertifikat atas lahan yang dikuasai pihak TNI AL. Dalam orasinya, mereka juga mendesak upaya penyelamatan kawasan Marafenfen serta segera disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat.

Proses Pelepasan Tanah yang Dipertanyakan

Dihubungi melalui sambungan telepon, (14/9/2021) Mika Ganobal mewakili Masyarakat Adat setempat, berbagi kisah tentang bagaimana awalnya tanah adat itu bisa jatuh ke tangan TNI AL. Menurutnya, proses kepemilikan tanah sampai rencana dibangunnya bandara, tidak masuk akal bagi Masyarakat Adat di Desa Marafenfen.



“Saya dengar cerita dari Mama Do,” kata Mika menyinggung cerita yang didapatnya dari mendiang Dolfintje Gaelagoy atau akrab disapa Mama Do, perempuan pejuang Masyarakat Adat yang berasal dari Marafenfen. “(Kala itu) bapaknya (Mama Do) lagi di padang sabana, lalu ada helikopter mendarat. (Aparat) TNI AL tanya sama bapaknya Mama Do ini, di mana Kampung Marafenfen. Lalu, ia tunjuk arah, kemudian mereka berbalik. Besok-besoknya, mereka ke kampung dan ada pertemuan.”

Pihak TNI AL telah mengajukan surat kepada KOMNAS HAM yang dilengkapi dengan nama-nama warga Desa Marafenfen yang diklaim telah mewakili Masyarakat Adat di sana untuk melepaskan tanah adat mereka ke TNI AL dan menyatakan mendukung pembangunan bandara.

Namun, berdasarkan daftar tersebut, terdapat sejumlah kejanggalan.

“Ada beberapa orang yang di bawah umur,” ungkap Mika. Selain itu, ia juga mengutarakan ada nama penyandang disabilitas yang telah dikonfirmasi memiliki kebutuhan khusus sejak lahir serta nama-nama orang yang ternyata sudah tidak berdomisili di Desa Marafenfen. Mika menambahkan, “Ada juga orang-orang yang ada tanda tangannya, tapi mereka tak pernah merasa tanda tangan dan mereka bukan warga Marafenfen.”

Mewakili Masyarakat Adat, Mika yang pernah terlibat dalam gerakan penyelamatan hutan adat #SaveAru beberapa tahun lalu, mengutarakan bahwa hingga saat ini, tak ada uang satu rupiah pun yang diterima Masyarakat Adat sebagai ganti rugi. Masyarakat Adat juga menolak rencana pemindahan warga ke tempat lain dengan janji akan dibuatkan rumah dan diberikan sertifikat dua hektar per kepala keluarga. Alasannya, lokasi yang hendak dijadikan tempat tinggal bagi warga itu, tak lain adalah wilayah adat.

Ruang Hidup Masyarakat Adat Marafenfen

Lahan yang hendak dijadikan area pembangunan bandara dan berbagai fasilitas lainnya tersebut, merupakan bagian dari wilayah adat Masyarakat Adat Marafenfen. Mika menggambarkan bagaimana kawasan tersebut punya peran penting sebagai habitat berbagai satwa yang sebagian endemik hanya ada di Aru, seperti babi, rusa, walet, kakatua jambul kuning, cendrawasih, dan lain-lain.



Aksi Masyarakat Adat Marafenfen di depan Kantor Pengadilan Negeri Dobo.
Sumber foto: Dokumentasi Masyarakat Adat Marafenfen.



Sejak dulu, di sanalah Masyarakat Adat melakukan upacara daotel untuk berburu di padang sabana. Secara harafiah, "daotel" dapat diterjemahkan dengan pembakaran alang-alang.

"Itu proses perburuan yang melibatkan sejumlah kampung di Aru Selatan," kata Mika. "Ada sebagian wilayah itu, - ilalang yang sudah dikavling (diperuntukkan secara adat) - yang dibakar dan dijadikan area perburuan. Jadi, saat dibakar, rusa itu keluar lalu mereka menangkap gunakan panah. Itu setiap tahun ada dan ritual itu sudah ada sejak zaman leluhur."

Ketika persoalan sengketa lahan terjadi, bersamaan dengan hadirnya kendaraan-kendaraan yang diduga terkait dengan urusan rencana pembangunan bandara, Mika dan Masyarakat Adat setempat menyadari jumlah rusa yang kian sedikit. Mereka menduga ada banyak hewan itu mati tertabrak truk serta diburu tanpa aturan adat menggunakan senjata oleh bukan Masyarakat Adat.

Mika bilang, "Dulu mau berburu gampang, tapi kalau sekarang sudah susah." Persoalan sengketa lahan maupun rencana pembangunan bandara pun mengancam sumber penghidupan Masyarakat Adat sebab mereka tak dapat lagi berburu sesuai adat. Bagi Masyarakat Adat, perburuan bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan pangan, melainkan dari situlah mereka meneruskan tradisi leluhur dan dapat memperoleh hasil yang digunakan untuk menutupi biaya sehari-hari, termasuk keperluan pendidikan anak. Perburuan dalam jumlah maupun waktu yang terbatas, juga menjadi cara bagi Masyarakat Adat melestarikan lingkungan dan flora-fauna yang ada di dalam wilayah adat.

Kini, perjuangan Masyarakat Adat Marafenfen kian mendapat sorotan luas. Selain dari kalangan mahasiswa di Kota Ambon, petisi yang menyatakan dukungan terhadap hak atas wilayah adat dan pelestarian ekosistem di Kepulauan Aru, telah ditandatangani oleh ribuan orang dan terus bertambah. Pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru bersama dengan DPRD setempat juga menyambut dukungan yang mengedepankan pesan bahwa "Masyarakat Adat Marafenfen bukan mau melawan negara, (tetapi) mereka mau membela haknya atas tanah."

Aksi penolakan Masyarakat Adat Marafenfen di Pangkalan Udara TNI AL.
Sumber foto: Dokumentasi Masyarakat Adat Marafenfen.





Hentikan Kekerasan terhadap Masyarakat Adat Rendu

Oleh Simon Welan



Potongan gambar pada video pemborgolan Mama Mince pada Senin, 4 Oktober 2021 di jalan menuju lokasi Lowo Se di Desa Rendu Butowe.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN Nusa Bunga.

Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi meminta aparat kepolisian maupun Brimob (Korps Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia) yang bertugas di lapangan dalam menjaga keamanan tim survei dan Balai Wilayah Sungai (BWS) di Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) agar tidak melakukan tindak kekerasan dan intimidasi terhadap Masyarakat Adat. Sebab, aksi perlawanan yang dilakukan tersebut merupakan bentuk perjuangan Masyarakat Adat dalam mempertahankan hak Masyarakat Adat sebagai pemilik wilayah adat di sana.

Hal itu dikatakan Sekjen AMAN saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan (6/10/2021) untuk menanggapi situasi terakhir di Rendu, Ndora, dan Lambo terkait pembangunan Waduk Lambo.

Rukka mengatakan bahwa sikap arogan aparat dengan memborgol tangan seorang ibu dalam aksi penghadangan di pintu masuk menuju lokasi kebun Masyarakat Adat, adalah tindakan kekerasan dalam upaya mengkriminalisasi Masyarakat Adat yang berjuang mempertahankan haknya.

Ia menyayangkan sikap aparat yang tidak mampu menahan diri dan mengontrol emosi, padahal yang mereka jaga adalah masyarakat sipil yang tidak mengancam.

"Masyarakat Adat Rendu, Ndora, dan Lambo bukan musuh yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban negara," ucap Rukka, "sehingga aparat kepolisian tidak harus menangkap dan memborgol mereka. Semestinya, polisi melakukan pendekatan yang humanis untuk meredam situasi."

Ia menegaskan kalau intimidasi dan bentuk kekerasan yang dilakukan pemerintah maupun aparat terhadap Masyarakat Adat Rendu, Ndora, dan Lambo dalam memuluskan pembangunan Waduk Lambo, tidak dibenarkan karena merugikan Masyarakat Adat.

* Penulis adalah staf Infokom AMAN Nusa Bunga.



"Aparat Brimob datang hanya untuk memaksa Masyarakat Adat dan cenderung bertindak brutal anarkis," katanya. "Oleh karena itu, kami minta Kapolda NTT untuk segera menarik pasukan karena kami tidak butuh aparat di tanah kami. Kami hanya butuh ketenangan jiwa dan raga kami dalam beraktivitas di tanah warisan Leluhur kami," ungkap Bernadinus.

Menurut Anton Johanis Bala, seorang pegiat Masyarakat Adat dan pakar hukum, ada alasan mengapa mama-mama melakukan aksi penolakan lokasi pembangunan waduk. "Apabila pembangunan waduk dilakukan di Lowo Se, maka Masyarakat Adat akan mengalami kerugian besar, yakni hilangnya sebagian perkampungan, bangunan publik, lahan pertanian yang berkualitas baik, padang penggembalaan ternak, padang perburuan adat, pekuburan leluhur, dan tempat-tempat sakral atau ritus adat," katanya melalui tulisan pada Portal AMAN.or.id (28/10/2021). Sementara itu, pembangunan waduk di lokasi Malawaka atau Lowo Pebhu, selain membuat Masyarakat Adat hanya akan kehilangan lahan pertanian dan padang, sebetulnya memiliki berbagai kelebihan terkait dengan aksesibilitas dan distribusi air.

Alasan lain, menurut Anton Johanis Bala, mengacu pada Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagekeo, di mana pembangunan waduk sesungguhnya berada di lokasi Lowo Pebhu dengan nama Ngabatata, sedangkan Lowo Se tidak untuk waduk, tapi untuk kepentingan lain.

"Usulan lokasi pembangunan waduk di Malawaka dan Lowo Pebhu sudah disampaikan masyarakat sejak tahun 2001 dan tahun 2015 kembali usulan yang sama itu disampaikan," tulisnya. Namun, Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dan pihak BWS mengabaikan hal itu dan bersikukuh pada lokasi di Lowo Se tanpa ada penjelasan.

Lewat tulisannya, ia juga mengacu pada ucapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Jakarta (4/8/2017) yang pernah bilang, "Semua pembangunan membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Jika tidak ada kesepakatan, maka pembangunannya tidak akan jadi dikerjakan."

Hermina Mawa sebagai korban, mengatakan bahwa pemborgolan atas dirinya terjadi saat ia dan mama-mama menghadang aparat Brimob dan BWS hendak pulang melakukan survei di wilayah adat. Menurutnya, mama-mama nekat melakukan penghadangan di pintu keluar karena BWS bersama tim survei dan aparat Brimob menerobos masuk ke lokasi Lowo Se untuk melakukan aktivitas survei dan pengukuran tanah milik Masyarakat Adat tanpa izin.



Masyarakat Adat Rendu tengah berjaga dalam mempertahankan wilayah adat.

Sumber foto: Dokumentasi AMAN Nusa Bunga.



“Mereka datang bagai pencuri yang hendak merampok dan merampas tanah kami, sehingga kami tahan mereka untuk meminta mereka mempertanggungjawabkan perbuatan mereka,” tutur Mama Mince. Ia menyinggung bahwa kriminalisasi dan kekerasan yang dilakukan aparat itu adalah pelanggaran terhadap hak asasinya sebagai masyarakat sipil sekaligus Masyarakat Adat.

Mama Mince mengutarakan, polisi seharusnya menjadi alat negara yang hadir untuk melindungi, mengayomi, dan menghormati hak-hak masyarakat sipil serta menjalankan tugasnya dengan pendekatan yang humanis agar masyarakat tidak menilai buruk kinerja mereka.

“Peristiwa pemborgolan terhadap saya, sesungguhnya mencoreng nama baik kepolisian dan menunjukkan betapa tidak profesionalnya aparat kepolisian dalam menangani persoalan masyarakat sipil di lapangan,” ucap Mama Mince.

Mama Mince berharap Kapolda Provinsi NTT segera menarik aparat kepolisian dan Brimob dari Rendu, Ndora, dan Lambo serta memberi peringatan keras terhadap oknum Brimob yang melakukan tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap dirinya dan Masyarakat Adat lain.



Aktivitas menenun untuk menjaga wilayah adat.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN Nusa Bunga.

Perbincangan bersama Mama Mince terkait perjuangan Masyarakat Rendu dapat didengar lewat Podcast Radio Gaung AMAN pada Program Jelajah Nusantara dengan topik “Menenun untuk Menjaga Wilayah Adat.”

Berbagai informasi terkini mengenai situasi hukum dan politik, termasuk kasus yang menimpa Masyarakat Adat, bisa dibaca pada Portal Berita AMAN.or.id serta kanal media sosial AMAN (Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube.)



Meneruskan Seni dan Budaya Osing Lewat Sekolah Adat

Oleh Ilham Saifulloh



Aktivitas berkesenian di Sekolah Adat Pesinauan.
Sumber foto: BPAN Osing.

Masyarakat Adat Osing merupakan suku asli Banyuwangi yang tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sehari-hari, kami masih menerapkan prinsip "bersama-sama dan gotong royong." Desa-desa yang menjadi tempat tinggal Masyarakat Adat Osing pun memiliki berbagai keunikan, mulai dari seni, budaya, kuliner, dan pola hidup yang masih menjaga tradisi sejak dulu.

Mayoritas Masyarakat Adat Osing bermata pencarian sebagai petani. Kami memiliki sumber air yang melimpah, di mana sistem pengolahan sawah masih mengacu pada adat dan tradisi. Setiap musim panen, kami melakukan upacara tradisi dengan memainkan alat musik angklung paglak dan menyajikan kuliner khas. Selain bertani, ada banyak dari kami yang berprofesi sebagai seniman dan tukang kayu.

Di wilayah adat kami, kami memiliki sekolah adat. Kehadiran Sekolah Adat Osing yang kami namai Pesinauan, merupakan terobosan dalam memperkokoh jati diri Masyarakat Adat Osing, terutama generasi muda. Sekolah Adat Osing menjadi wahana pewarisan nilai-nilai kearifan lokal antar-generasi agar kemandirian kami dapat terwariskan kepada para penerus sesuai perkembangan zaman. Sekolah adat kami berlokasi di Dusun Joyosari, Desa Olehsari, Kecamatan Glagah.

Pesinauan dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pembinaan generasi muda tanpa mempengaruhi waktu kegiatan belajar di sekolah formal. Materi yang diberikan kepada peserta didik pun diharapkan dapat memberi tambahan ilmu pengetahuan dan perilaku positif yang berbasis adat.

** Penulis adalah pemuda adat dari Desa Kemiren, Banyuwangi sekaligus anggota BPAN Osing. Artikel ini merupakan bagian dari tulisan yang ditulis oleh Ilham dan Mak Sus untuk Kisah dari Kampung - gerakan penulisan buku yang digagas oleh AMAN dalam upaya menghadirkan profil berupa kisah dari berbagai kampung di penjuru Nusantara dan ditulis oleh para Kader AMAN.*



Pesinauan berkomitmen mengembangkan pendidikan adat untuk mewujudkan Masyarakat Adat yang cerdas, berdaulat, mandiri, dan bermartabat. Kami mengkreasikan sistem pendidikan yang menciptakan generasi penerus yang setia menjaga wilayah adat, tradisi, budaya, adat istiadat, dan lingkungannya; memperjuangkan hak Masyarakat Adat; serta mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai pengetahuan leluhur Masyarakat Adat berasaskan keberagaman. Sekolah Adat Osing bertujuan untuk memperkokoh jati diri Masyarakat Adat, terutama pemuda adat Osing agar berpegang teguh pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal leluhur. Keberadaan Pesinauan ini diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas Masyarakat Adat dalam mewujudkan cita-citanya. Secara khusus, tujuan dari pembelajaran di sekolah adat kami, adalah untuk mewedahi sistem pendidikan berbasis pengetahuan adat.

Di kampung, para pemuda pemudi adat aktif mengelola pariwisata dan kesenian, seperti Tari Gandrung, Barong Kemiren, Tabuan Gede, Mocoan, dan tari-tari tradisional lainnya. Namun, Covid-19 telah mempengaruhi sektor pariwisata yang berakibat pada tidak adanya wisatawan, sehingga banyak dari Masyarakat Adat akhirnya fokus ke sawah dan kebun. Sementara itu, para pemuda adat Osing sehari-hari lebih banyak melakukan aktivitas di Pesinauan yang menjadi tempat bagi kami berkumpul dan belajar selama pandemi.

Kegiatan Sekolah Adat Osing

Di sekolah adat, kami melakukan berbagai aktivitas dalam rangka proses pewarisan nilai-nilai kearifan lokal. Upaya itu sekaligus menjadi bagian dari respon terhadap perubahan perilaku yang berakibat semakin luntarnya jati diri Masyarakat Adat serta semakin meningkatnya intoleransi yang dapat mengakibatkan perpecahan.

Kegiatan di sekolah adat tentu tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dari semua pihak, utamanya pemangku adat. Oleh karena itu, dukungan dan kerja sama semua pihak sangat diharapkan agar kegiatan di sekolah adat bisa berlangsung secara simultan dan berkesinambungan.

Di Pesinauan, para guru kami termasuk para tetua maupun tokoh adat, termasuk perempuan adat, yang memberikan berbagai materi dan pembelajaran. Di sekolah adat-lah kami biasa melakukan kegiatan-kegiatan bersama, mulai dari belajar tentang ritual, masakan atau makanan ritual, hingga bercocok tanam.

Salah satu dari pengajar di sekolah adat kami, adalah Susiati Ningsih atau biasa kami panggil Mak Sus. Lokasi Pesinauan merupakan pula sawah milik Mak Sus. Mak Sus memberikan kami materi terkait aren godhong, yaitu wadah pembungkus makanan dari daun, khususnya daun pisang. Tradisi membungkus makanan menggunakan daun, sudah jadi tradisi kami. Orang Osing mengenal berbagai daun untuk pembungkus yang disebut aren. Selain ramah lingkungan, bungkusannya itu bisa menahan makanan dari panas dan menjaga suhu, sehingga makanan menjadi lebih tahan lama dan tidak cepat basi. Kearifan lokal Orang Osing dalam wujud aren, merupakan warisan leluhur kami. Mak Sus juga memberikan wawasan terkait pertanian serta pembuatan kue dan makanan ritual kami.

Di sekolah adat, kami pun belajar bertani, memasak, menari, dan lain-lain untuk meneruskan seni dan budaya kami.



Para pemuda adat dari Masyarakat Adat Osing.

Sumber foto: BPAN Osing.



Cara Baso Memperkuat Resiliensi Masyarakat Adat

Oleh Yayan Hidayat

Hampir dua tahun lebih kita menghadapi wabah virus Covid-19. Penyebaran Covid-19 pun telah begitu memprihatinkan di Indonesia. Di tengah lambannya respon pemerintah dalam melakukan langkah-langkah tanggap darurat, Masyarakat Adat telah melewati kondisi terburuk.

Baso, Kepala Desa Bone Lemo sekaligus utusan politik Masyarakat Adat, adalah kepala desa yang bertindak cepat mengambil langkah progresif. Ia bertanggung jawab atas keselamatan 1.268 jiwa warga Desa Bone Lemo, satu dari empat desa di wilayah adat Banua Lemo. Ia juga memastikan ketahanan pangan Masyarakat Adat. Berbagai cara ia lakukan demi menciptakan resiliensi Masyarakat Adat.

"Tak mungkin dapat tidur nyenyak jika ada tangis di samping rumah. Tak mungkin bisa hangat jika api di dapur tetangga tidak menyala," katanya. Baso mengungkapkan bahwa dalam masa sulit, ia selalu ingat pesan leluhur. "Kami diajarkan untuk saling tolong menolong dengan sesama. Kesadaran itu menggugah saya untuk merumuskan upaya tanggap darurat."

Dari Karantina hingga Pendirian Bilik Sterilisasi

Selain melakukan penutupan kampung, Baso juga membentuk Satgas #AMANKanCovid19 yang beranggotakan para pemuda adat dan perempuan adat yang tergabung dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Bone Lemo.

Di setiap portal pembatas, pemuda adat bertugas mengecek masuk-keluarnya warga, terutama mengidentifikasi warga yang pulang dari rantauan. Sementara mereka yang tergabung di dalam PKK, membuat cairan disinfektan organik. Ramuan itu telah diajarkan turun temurun dan dimodifikasi. Jika di kampung ada warga yang sakit, maka akan diobati tabib dengan penguapan cairan daun sirih dan jeruk nipis. Baso menceritakan kalau metode tersebut sudah diterapkan dari generasi ke generasi untuk membasmi kuman dan penyakit.



Baso, Kepala Desa Bone Lemo.
Sumber foto: Dokumentasi pribadi.

Menariknya, Baso menggerakkan warga adat di tiga desa di wilayah adat Banua Lemo bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu, untuk mengkreasikan bilik sterilisasi menggunakan cairan disinfektan alami, sehingga mereka tidak tergantung pada dukungan medis yang terbatas. Inovasi yang berbasis pada kearifan dan sumber daya lokal itulah yang menjadi benteng pertahanan dalam perang melawan Covid-19.

Wilayah Adat Sebagai Sumber Pangan

Di tengah krisis, peran Masyarakat Adat dibutuhkan untuk memastikan pasokan pangan. Wilayah adat adalah sumber pangan. Beragam jenis tanaman pangan maupun pengetahuan tradisional mengenai benih dan perladangan, dapat dipertahankan jika wilayah adat tetap kita jaga.

* Penulis adalah staf pada Direktorat Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat (P3MA) PB AMAN.



Di kampung-kampung, Baso mendorong kebun jagung di atas 10 hektar lahan. Ia bilang, itu akan ditambah luasannya untuk menjaga ketersediaan pangan. Para pemuda adat dan perempuan adat dilibatkan. Masyarakat Adat Banua Lemo sadar betul bahwa pasokan pangan berasal dari wilayah adat, sehingga dengan menjaga dan mengelola wilayah adat, Masyarakat Adat Banua Lemo merasa semakin kuat menghadapi pandemi. Dengan ketersediaan pangan yang dimiliki, Baso bersama warga adat ikut menyalurkan bantuan ke keluarga-keluarga yang terdampak wabah.

Kesiapan Menghadapi Krisis

Dalam menghadapi situasi tidak normal akibat Covid-19, Masyarakat Adat Banua Lemo tetap menggelar musyawarah adat dengan para pemuka adat untuk menentukan langkah dan strategi. Masyarakat Adat saling berbagi peran dan tugas.

“Salah satu hal yang sangat menggugah jiwa saya sebagai kepala desa, adalah saat menyampaikan ke khalayak warga mengenai kebutuhan untuk membuka kebun jagung,” ungkap Baso. Kala itu, ia menunjuk sejumlah tanah dan tidak ada satu pun yang menolak, bahkan warga sendiri yang mengusulkan agar tanah mereka bisa digunakan.

Kita sebagai Masyarakat Adat telah menunjukkan bagaimana kita menjadikan wilayah adat kita sendiri sebagai tempat berlindung yang paling aman di tengah maraknya sebaran virus. Melalui pembelajaran dari kepemimpinan Baso sebagai kepala desa yang berasal dari Masyarakat Adat, kita juga melihat berbagai praktik baik dalam merespon situasi tanggap darurat. Banua Lemo pun menjadi potret sukses dalam upaya mengoptimalkan pengetahuan dan pengobatan tradisional maupun mewujudkan kedaulatan pangan.



Masyarakat Adat Banua Lemo di Kabupaten Luwu, Sulawesi Tengah, sedang membuat *hand sanitizer* dari bahan-bahan organik.



BPAN Gelar Kemah Raya

Oleh Akbar Wiyana

Pandemi tidak menyurutkan semangat pemuda adat untuk berkonsolidasi demi gerakan yang lebih terarah. Menjelang Jambore Nasional (Jamnas) IV, Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) menggelar Kemah Raya di sejumlah region.

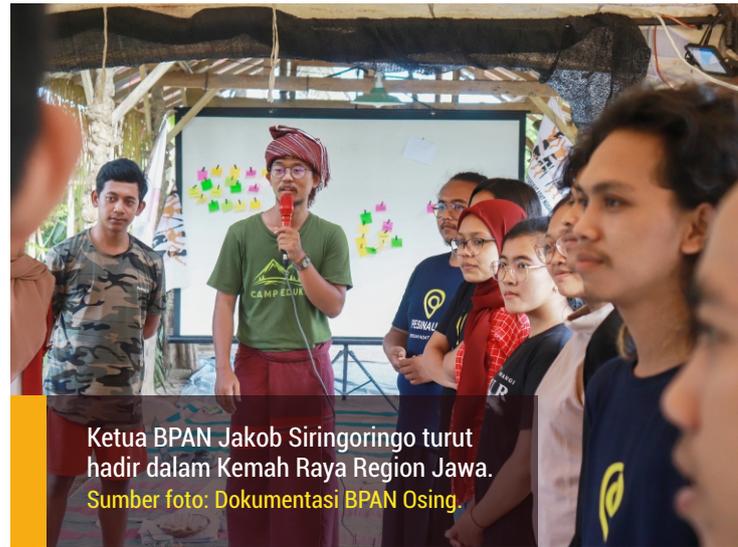
Kemah Raya diawali di Region Jawa dengan Masyarakat Adat Osing sebagai tuan rumah. Pada 12-16 Oktober 2021, Kemah Raya dilangsungkan di Sekolah Adat Pesinauan, Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sebanyak 25 pemuda adat turut berpartisipasi. Mereka adalah 20 orang perwakilan Pengurus Daerah (PD) BPAN Osing dan lima orang perwakilan PD BPAN Banten Kidul.

Para pemuda adat menjalani berbagai aktivitas, antara lain saling bercerita tentang kampung, menguatkan rasa kebersamaan, membahas perkembangan kondisi terkini melalui diskusi dan nonton film, serta merumuskan gerakan BPAN ke depan.

Peserta Kemah Raya juga meluangkan kesempatan untuk menjelajah wilayah adat setempat untuk mengenal budaya dan adat istiadat, seperti kunjungan ke Makam Buyut Cili dan Rumah serta belajar tentang kesenian adat barong di Desa Adat Kemiren.

Ketua BPAN Jakob Siringoringo mengatakan kegiatan tersebut merupakan terobosan untuk terus membangun kekompakan seluruh pemuda adat di Nusantara di masa pandemi. Dengan tema "Gerakan Pulang Kampung," ia mencoba memompa semangat baru di kalangan pemuda adat untuk mengurus kampung.

"Kemah Raya ini akan diselenggarakan di tujuh region dengan sembilan titik, di antaranya Banyuwangi di Region Jawa, Bengkulu di Region Sumatera, lalu dilanjutkan di Lombok di Region Bali-Nusa Tenggara," ungkap pemuda adat asal Tanah Batak di sela-sela kegiatan kemah di Banyuwangi itu.



Ketua BPAN Jakob Siringoringo turut hadir dalam Kemah Raya Region Jawa. Sumber foto: Dokumentasi BPAN Osing.

Jacob menambahkan dengan mengutarakan bahwa Kemah Raya adalah bagian dari rangkaian proses musyawarah di tubuh organisasi BPAN. Ia menilai Kemah Raya di wilayah adat, dapat lebih banyak membuka peluang untuk mengeksplorasi ide dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi di kampung.

"Sebelum Jamnas, kita gelar konsolidasi region. Dan hasil dari konsolidasi ini akan dibahas di Jamnas pada bulan Desember 2021 secara online," kata Jakob.

Selain dalam rangka mencoba menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi pemuda adat, kegiatan itu juga menjadi sarana untuk bisa saling belajar dan mengenal berbagai komunitas adat serta cara menjaga adat istiadat.

"Contohnya, Kemah Raya pertama ini, teman-teman dari Kesatuan Adat Banten Kidul belajar ke Osing. Teman-teman Osing sendiri juga belajar kepada mereka," ujarnya.

* Penulis adalah staf Infokom AMAN Osing sekaligus anggota dari BPAN Osing.



Selama sepekan, para pemuda adat menghadirkan dua ruang budaya untuk bertemu di satu tempat yang menjadi lokasi berlangsungnya kegiatan. Bagi Jakob, Kemah Raya pun selayaknya sarana refleksi untuk mengecek kepengurusan di sejumlah region.

"Beberapa Pengurus Daerah di beberapa region sempat mengalami perlambatan, bahkan kekosongan kepengurusan, sehingga sangat berpengaruh pada langkah-langkah dalam mengorganisir anak-anak muda."

Dengan protokol kesehatan yang ketat, para peserta yang mengikuti Kemah Raya adalah mereka yang telah diimunisasi atau divaksin Covid-19 minimal satu kali. Jumlah partisipasi juga sengaja dibatas, yaitu maksimal hanya 50 orang untuk menghindari kerumunan.

Jakob berharap para peserta Kemah Raya dapat saling belajar serta menularkan semangat kepada pemuda adat lain untuk mengurus kampung.

"Semoga ke depan semakin banyak pemuda adat yang tertarik dan sadar untuk mengurus wilayah adatnya," kata Jakob. "Saya optimis bahwa pemikiran dan gagasan yang dibangun BPAN akan semakin maju."

Salah satu peserta Kemah Raya, Awang Setiyaki Aji, mengaku senang dapat bertemu dan berbagi cerita dengan pemuda adat dari luar komunitasnya. Bagi pemuda adat asal Kemiren itu, hal yang paling berkesan adalah cerita tentang pengalaman dan konflik yang dihadapi Masyarakat Adat di berbagai daerah.

"Karena bisa menambah pengetahuan kita atas apa yang terjadi di luar kita," ungkap pemuda adat berusia 22 tahun tersebut. Awang memahami kalau semangat dan kekompakan bisa menjadi jalan keluar dalam upaya untuk mempertahankan warisan leluhur.

Sucia Lisdamara Yulmanda Taufik, pemuda adat perempuan dari Banten Kidul cukup terkesan mengikuti Kemah Raya selama sepekan. Ia mengungkapkan pertemuan itu sebagai pecut semangat untuk terus menjaga adat istiadatnya, termasuk seni dan budaya.

"Saya melihat kawan-kawan Osing sangat cinta dengan kesenian tradisional. Ini yang menjadi semangat bagi kami untuk terus melestarikan kesenian tradisional yang saat ini sudah mulai ditinggalkan," ucap Sucia.



Suasana Kemah Raya Region Jawa di Sekolah Adat Osing Pesinauan.
Sumber foto: Dokumentasi BPAN Osing.



Kekuatan Perempuan Adat di Masa Krisis

Oleh Nurdiyansah Dalidjo

Di balik kerentanan yang selama ini menyelimuti, perempuan adat menegaskan kekuatan di tengah pandemi. Pengetahuan, otoritas, dan wilayah kelola perempuan adat adalah tiga hal yang kerap diabaikan.

Majalah Gaung AMAN menghadirkan perbincangan dengan Ketua Umum PEREMPUAN AMAN Devi Anggraini. Melalui obrolan ini, ia tidak hanya mengabari pada kita tentang kondisi terkini perempuan adat, melainkan pula mengutarakan hal-hal lain, mulai dari makna inisiasi kebun kolektif yang dikembangkan oleh perempuan adat, pandangan terhadap penanganan Covid-19, hingga alternatif solusi mengatasi pandemi dan ancaman krisis pangan yang berperspektif perempuan adat.

Tentu kita mau tahu kondisi perempuan adat selama Covid-19 melanda. Seperti apa kerentanan perempuan adat secara umum mengingat perempuan adat memainkan peran utama dalam menjaga ketahanan hidup komunitas adat?

Pertama, (perempuan adat) yang berada di wilayah yang kehidupannya masih subsisten atau semi-subsisten, di mana wilayah adatnya belum mendapatkan tekanan, baik proyek strategis nasional, konsesi, maupun konservasi, perempuan adat mampu mandiri dari hasil-hasil wilayah adatnya. Pandemi tidak terlalu memberi dampak signifikan karena proses lockdown adalah proses harian mereka, di mana mereka memang terbatas aksesnya dengan pihak luar. Dalam situasi itu, wilayah adat lebih aman. Kedua, perempuan adat yang berada di wilayah adat yang sudah ada - bahkan didominasi oleh - konsesi maupun proyek strategis nasional. Kerentanan dari perempuan adat, - kalau itu pertambangan dan perkebunan - pasti bicara soal akses air bersih dan pangan. Lockdown yang dilakukan hanya berlaku pada masyarakatnya, tapi mereka tak mampu hentikan operasi perusahaan, sehingga interaksinya jadi sangat rentan. Dalam situasi itu, semakin diperparah oleh konflik sosial. Misalnya, di Rakyat Penunggu, mereka mempertahankan wilayah adatnya dalam situasi pandemi, di mana mereka diokupasi dan tidak terhindarkan kerumunan, bentrok fisik. Paparan Covid-19 menjadi sesuatu yang akan dihadapi secara langsung oleh komunitas.



Saat ini, PEREMPUAN AMAN telah memiliki 65 wilayah pengorganisasian. Sebelum pandemi, perempuan adat menginisiasi kebun kolektif dan pembibitan. Pembelajaran apa yang ingin dibagi mengenai peran perempuan adat sebagai garda depan kedaulatan pangan?

Perempuan-perempuan adat di Rakyat Penunggu, menyadari bahwa mereka selama ini tidak terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. Kesulitan yang dihadapi mereka, terutama untuk memenuhi pangan secara mandiri. Kita mengupayakan untuk mendorong perempuan adat melakukan penanaman kembali dan menggunakan wilayah adatnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ketika kita mulai, pandemi datang dan mereka mulai panen sayur. Saat lockdown dilakukan, itu terasa sekali manfaatnya. Proses itu disadari dan digunakan untuk secara terus-menerus mengajak perempuan adat mulai memikirkan situasi yang akan mereka hadapi ke depan.



Di tengah wabah, perempuan adat justru menunjukkan peran aktif dan menegaskan kepemimpinan. Apa yang menjadi kekuatan bagi perempuan adat?

Kekuatan perempuan adat ada pada tiga hal, yaitu wilayah kelola perempuan adat yang ada di dalam wilayah adat, pengetahuan, dan otoritas. Tapi, tiga hal itu diabaikan, bahkan di komunitasnya sendiri. Mengapa kita memulainya dengan kebun kolektif? Banyak orang berpandangan ketika kita memulai inisiatif itu, seperti mendomestikasi perempuan. Tapi, kami justru tahu inilah ruang yang paling dekat dan yang paling dikuasai oleh perempuan adat untuk menyampaikan kepentingannya dan meletakkan peran yang besar. Ruang itu ingin digunakan juga oleh perempuan adat untuk membalik stigma. Bahwa ruang domestik adalah sumber kekuatan yang harus digunakan dan disuarakan supaya ruang itu tidak dilecehkan. Jadi, pengakuan atas peran perempuan adat, tidak hanya dilihat dalam konteks legal formal, tapi pengakuan yang melekat pada kehidupan keseharian kampung.

Apa tantangan khas yang dihadapi perempuan adat di dalam gerakan kedaulatan pangan pada level kampung?

Ada dua hal yang paling mendasar: patriarki dan feodalisme. Feodalisme bukan hanya pada kelompok lelaki, bahkan di dalam kelompok perempuan adat sendiri, itu masih bekerja. Di PEREMPUAN AMAN dan wilayah pengorganisasiannya, pengambilan keputusan harus musyawarah dan mufakat. Di dalam proses itu, di antara mereka bernegosiasi, mengambil keputusan bersama, menghormati keputusan, dan menjalankannya dengan mekanisme-mekanisme yang disepakati. Proses itu membuat perempuan adat lebih percaya diri mengkritisi situasi. Proses itu tentu akan mengganggu kenyamanan pihak-pihak yang punya privilese: elit kelembagaan adat, istri tetua adat.... Di dalam proses itu seringkali kita harus melakukan komunikasi berlapis, bukan hanya dengan tetua dan pengurus kampung, tapi juga keluarga dan organisasi.

Apa kritik PEREMPUAN AMAN terhadap penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah? Kita tahu kalau sebagian besar keputusan soal itu, dilakukan oleh lelaki serta melibatkan aparat militer dan kepolisian.

Misalnya, informasi yang beredar semua melalui media sosial atau virtual. Perempuan adat belum tentu punya pengetahuan untuk itu atau punya alat untuk akses. Jadi, itu mengeksklusi banyak perempuan adat. Kedua, bias perkotaan dengan mensyaratkan, salah satunya ada KTP atau NIK yang belum tentu perempuan adat terdaftar, sehingga tak bisa akses vaksin. Ketiga, informasi yang diterima sangat terbatas karena bahasa, contoh istilah PPKM atau lockdown itu bukan sesuatu yang dekat dengan kehidupan perempuan adat, sehingga sulit memahaminya. Situasi itu ditopang oleh kesenjangan pemahaman di tenaga kesehatan. Fasilitas kesehatan juga sulit dijangkau karena banyak nakes (tenaga kesehatan) berasal dari luar kampung. Penanganan pemerintah punya kecenderungan membawa lebih banyak perempuan adat keluar dari kampung untuk akses vaksin. Justru di dalam perjalanan, mereka jadi rentan karena dimasuki di dalam bis. Kerumunannya terjadi selama proses mereka mengakses vaksin.



Penyerahan bantuan APD dan masker AMAN Toraya di Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan



Lalu, apa solusi alternatif yang seharusnya diupayakan dalam mengatasi kondisi yang dimiliki oleh perempuan adat, mengingat kita sedang menggaungkan program vaksinasi?

Pemerintah harus memberikan afirmasi kepada Masyarakat Adat untuk mengakses vaksin. Ngga perlu pakai banyak persyaratan selama pengurus kampung atau tetua adat atau kelembagaan adatnya mengatakan ini warga kami. Di Masyarakat Adat, fasilitas kesehatan tidak terlalu tersedia, jadi kapan mereka tes kesehatan, sehingga ketika akses vaksin diberikan, itu berikutan dengan pengecekan kesehatan yang lebih detail. Pemerintah itu suka sekali bikin program yang banyak dan infrastruktur banyak, tapi tak pernah digunakan. Bayangkan kalau pemerintah menggunakan infrastruktur Posyandu! Vaksinasi itu 'kan imunisasi. Imunisasi Covid-19 itu, ketika ditempatkan di kader-kader Posyandu, jauh lebih efektif. Kader Posyandu akan bicara dua kelompok utama: ibu dan anak. Kita akan dapatkan data terbaik dari proses itu dan kita akan tahu penanganan yang terbaik yang bisa dilakukan. Kader Posyandu itu selalu ada di setiap dusun, bahkan di tempat-tempat terpencil.

Apa pesan yang ingin sampaikan kepada kawan-kawan perempuan adat dan masyarakat umum?

Untuk kawan-kawan perempuan adat, saya menyampaikan semangat terus untuk menjaga kerja-kerja kolektif di tingkat kampung dan memastikan pemenuhan kebutuhan kehidupan kita tidak disandarkan pada orang luar karena dengan itulah kita bisa menunjukkan kekuatan dan kepemimpinan perempuan adat untuk melewati masa-masa krisis. Jadi, kekuatan dari kampung itu akan menunjukkan bagaimana pondasi dasar ekonomi negara ini disandarkan pada kampung dan wilayah adat. Ruang domestik perempuan adat adalah ruang seluas wilayah adat, bukan sepetak dapur. Pesan saya kepada publik, pengakuan atas peran perempuan adat dalam memastikan bagaimana kehidupan bisa berlangsung. Kita melihat pengetahuan perempuan adat bisa bekerja untuk membuat kampung-kampung bertahan menghadapi pandemi. Pengetahuan perempuan adat bisa dikonstruksikan untuk memastikan kesehatan publik. Kita memahami peran perempuan adat itu besar dalam kehidupan berbangsa. Itu menjadi dasar buat kita melihat bagaimana seharusnya kita memberikan pengakuan atas pengetahuan perempuan adat di dalam pengelolaan sumber daya alam dan menjamin keberlanjutan kehidupan.



Pemeriksaan kesehatan di Komunitas Masyarakat Adat Moi Maya di Kampung Semate, Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.

Perbincangan bersama Ketua Umum PEREMPUAN AMAN pada artikel ini, juga bisa didengar lewat Podcast Radio Gaung AMAN dalam Program Bincang Masyarakat Adat bersama Devi Anggraini.



Merayakan 14 Tahun UNDRIP

Oleh Nurdiyansah Dalidjo



Masyarakat Adat Sakai di Riau.

Sumber foto:
Dokumentasi AMAN.

Tanggal 13 September 2021 menjadi perayaan 14 tahun pengesahan Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat (The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) atau UNDRIP. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani UNDRIP.

Bagaimana perjuangan Masyarakat Adat dalam mendesak Majelis Umum PBB untuk mensahkan UNDRIP? Apa saja tantangan yang kala itu dilalui? Apa makna pengesahan deklarasi itu bagi Masyarakat Adat di dunia dan Indonesia? Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi dan Deputi IV Sekjen AMAN Urusan Sosial dan Budaya Mina Susana Setra berbagi kisah atas momen bersejarah bagi Masyarakat Adat tersebut.

Perjuangan Panjang Tanpa Menyerah

"Ini merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan Masyarakat Adat secara global," kata Rukka pada acara diskusi publik memperingati 14 tahun UNDRIP (13/9/2021). Ia menambahkan bahwa partisipasi Masyarakat Adat di PBB itu telah dimulau jauh sebelum PBB berdiri.

Merunut sejarahnya, protes Masyarakat Adat pada level internasional telah dimulai di era Liga Bangsa-Bangsa (LBB) (1919-1945). Tahun 1923, Pimpinan Haudenosaunee Deskaheh - mewakili Masyarakat Adat di Amerika Utara - pernah melakukan perjalanan panjang. Rukka bilang, awalnya beliau mendatangi London, Inggris dengan rencana untuk menemui Ratu Inggris. Tapi, ia melanjutkan perjalanan ke LBB di Jenewa, Swiss karena merasa di sana ada peluang untuk membicarakan masalah Masyarakat Adat. Kala itu, ia tak hanya ditolak bicara, melainkan LBB menutup pintunya rapat-rapat.

Meski tidak diizinkan bicara dan terpaksa pulang, namun semangatnya terlanjur menginspirasi dan menyadarkan berbagai Masyarakat Adat di dunia untuk terus melanjutkan perjuangan. Dua tahun kemudian, pemimpin keagamaan Masyarakat Adat Maori, T. W. Ratana, mengikuti jejak Deskaheh ke destinasi yang sama. Namun, lagi-lagi ditolak.

Salah satu dokumen awal terkait Masyarakat Adat, adalah Konvensi ILO (International Labour Organization) No. 169 yang lahir pada 1989. Rukka menjelaskan bahwa keluarnya konvensi itu terhubung dengan kawan-kawan dari Amerika Latin.

"Situasi mereka sebagai buruh perekebunan dari penjajah, sangat buruk," ungkap Rukka yang pernah terlibat dalam advokasi persoalan Masyarakat Adat di tingkat PBB. Saat itu, Masyarakat Adat hanya bisa berorganisasi melalui serikat buruh.



Masyarakat Adat di PBB.

Sumber foto:
Dokumentasi AMAN.

Perdebatan di kalangan PBB pun bergulir. Begitu pula perjuangan Masyarakat Adat yang kian gigih. Sorotan terhadap Masyarakat Adat kian mengemuka ketika Jose R. Martinez Cobo, Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities (Pelapor Khusus Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas), memaparkan hasil studi terkait dengan persoalan diskriminasi terhadap Masyarakat Adat - yang kala itu masih disebut sebagai "Indigenous populations" (penduduk asli) - pada 1981. PBB kemudian baru membuka peluang bagi Masyarakat Adat untuk berbicara melalui pendirian Working Group on Indigenous Populations (WGIP) atau Kelompok Kerja untuk Penduduk Asli - setelah tekanan yang terus diberikan oleh gerakan Masyarakat Adat di dunia.

"Itu perjuangan panjang dan lelah untuk debat dan negosiasi selama hampir 25 tahun," ucap Mina yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Urusan Internasional di AMAN.

Gerakan Masyarakat Adat terus mengalami kemajuan dengan hadirnya International Year of the World's Indigenous People pada 1993, International Decade of the World's Indigenous Peoples pada 1994, Permanent Forum on Indigenous Issues pada 2000, Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples pada 2001, Second International Decade of the World's Indigenous Peoples pada 2005, dan Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples pada 2007. Lalu, di tahun terakhir itu, tepatnya 13 September, UNDRIP diadopsi.

"Kemenangan," jawab Mina ketika ditanya apa makna UNDRIP bagi Masyarakat Adat dunia. "Dan selain itu, aku pikir jadi suatu kelegaan luar biasa karena deklarasi ini (merupakan) suatu deklarasi yang mengakui satu kumpulan hak Masyarakat Adat yang sangat lengkap, mulai dari urusan wilayah adat, sosial, politik, budaya, kelembagaan adat, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain."

PBB sendiri mengakui bahwa UNDRIP menjadi pernyataan paling komprehensif tentang hak Masyarakat Adat yang pernah dikembangkan serta memberikan keunggulan pada hak-hak kolektif ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di tataran internasional. Pengadopsian terhadap instrumen tersebut adalah indikasi paling jelas terkait komitmen untuk melindungi hak-hak individu dan kolektif Masyarakat Adat.

Rukka bilang, "UNDRIP mengontekstualisasikan seluruh instrumen HAM yang ada dan membuatnya relevan dengan Masyarakat Adat. Hak Masyarakat Adat yang paling khas disebut dengan hak menentukan nasib sendiri secara kolektif."

Pada awalnya, terdapat empat suara (negara) yang menentang UNDRIP. Mina menyinggung bagaimana dulu mereka dikenal dengan julukan CANZUS yang merupakan singkatan dari Canada, Australia, New Zealand, and United States (Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat).



"Kalau bicara PBB, itu bukan soal institusinya saja, tapi di dalamnya (adalah) anggotanya yang terdiri dari ratusan negara. Yang jadi persoalan, negara-negara itu," jelas Mina mengutarakan tantangan yang dihadapi ketika AMAN ikut terlibat dalam memperjuangkan UNDRIP. "Kelompok negara itu menentang FPIC (free, prior and informed consent) yang dianggap beri hak veto bagi Masyarakat Adat. Kalau perusahaan masuk wilayah adat, jika Masyarakat Adat tak setuju, maka berhak memutuskan." Mina mengungkapkan bahwa negara-negara yang awalnya menolak, lebih senang dengan konsultasi, bukan konsen. Amerika Serikat bahkan secara spesifik pernah menentang dan keluar dari ruang rapat atas penggunaan huruf "s" pada istilah "Indigenous Peoples." Padahal, itu bukan dimaksudkan dengan memaknai kedaulatan (sovereignty) untuk merdeka atau keluar dari negara sebab UNDRIP telah menegaskan bahwa tidak ada satu pasal pun yang bermakna pemisahan atas Masyarakat Adat dari negaranya.

Makna UNDRIP bagi Masyarakat Adat di Indonesia

Sejak awal berdiri, AMAN telah secara aktif ikut dalam berbagai negosiasi dan forum di dunia menggunakan instrumen-instrumen internasional untuk perjuangan hak Masyarakat Adat. UNDRIP memainkan peran strategis dan penting di dalamnya.

Mina mengatakan, "UNDRIP memberi harapan pada Masyarakat Adat di mana-mana, apalagi bagi Masyarakat Adat yang di negaranya belum ada pengakuan secara resmi. Kita tak bisa paksa pemerintah secara hukum walau pemerintah mengadopsinya. Tapi, UNDRIP menjadi semacam pencerah di tengah kegelapan karena itu lengkap sekali. Itu bisa kita gunakan sebagai acuan."

Di Indonesia, keberadaan Masyarakat Adat telah diakui oleh konstitusi. Meski begitu, kehadiran Undang-Undang tentang Masyarakat Adat masih absen. Saat ini, urusan Masyarakat Adat sedikitnya diatur oleh 32 peraturan-perundangan yang sektoral dan itu belum menjawab persoalan pemenuhan hak Masyarakat Adat, termasuk wilayah adat. Penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat pertama kali dilakukan oleh AMAN bersama berbagai kelompok masyarakat sipil tahun 2009. Namun, selama lebih dari satu dekade ini, RUU yang menjadi mandat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, belum juga disahkan.

"Pemerintah punya kewajiban, meski bukan kewajiban legal, tapi kewajiban moral untuk melaksanakan UNDRIP," tegas Mina. "Cara melaksanakannya adalah mensegerakan RUU Masyarakat Adat sebagai bagian dari niat baik yang ditunjukkan pemerintah waktu ikut mendorong deklarasi itu."

Aksi damai oleh Masyarakat Adat dalam menuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.



Upaya Berdaulat Pangan Masyarakat Adat Montong Baan

Oleh Rosa'adah *



Foto bersama para perempuan adat anggota PEREMPUAN AMAN PHKom Montong Baan.

Sumber foto: Dokumentasi PEREMPUAN AMAN PHKom Montong Baan.

Montong Baan merupakan nama tempat berdomisilinya ribuan Masyarakat Adat sejak ratusan tahun lalu di wilayah yang berjarak sekitar 45 kilometer dari Kota Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada 2013, Desa Montong Baan mekar menjadi dua desa: Desa Montong Baan dan Desa Montong Baan Selatan di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Sebagian besar kami bekerja sebagai petani untuk komoditi padi, sayur, dan tembakau; dan buruh harian.

Komunitas Masyarakat Adat Montong Baan bergabung menjadi anggota AMAN pada 2013. Lalu, tahun 2019, kami membentuk wilayah pengorganisasian PEREMPUAN AMAN dengan nama Pengurus Harian Komunitas (PHKom) Montong Baan.

Menurut aturan adat kami, pembagian tanah diatur oleh tetua adat (pengelingsir) dengan sistem komunal. Penggunaan dan pemanfaatannya dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu tanah kebun (pohon dan bambu); sawah (padi dan sayur-sayuran); dan ladang (kacang-kacangan dan umbi-umbian). Aturan Adat terkait itu, kami semboyankan dengan "Tunah Bareng-bareng." Artinya, bersama-sama memelihara dan menjaga warisan leluhur agar bisa diwariskan ke anak dan cucu.

Selain aneka padi, sayur, umbi, dan kacang-kacangan, terdapat pula berbagai jenis tanaman obat dan rempah, antara lain lekok buak (sirih), kenamplok (ceplok), pace (mengkudu), babak bakong (kulit kayu bakong), kunyit, kunyit putih, jahe, jahe merah, jahe putih, lengkuas, bangle, temulawak, dan sebagainya.

* Penulis adalah anggota dari PEREMPUAN AMAN di wilayah pengorganisasian PHKom Montong Baan.



Dari beberapa pertemuan yang dilaksanakan oleh PEREMPUAN AMAN, kami menyimpulkan bahwa kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal dan hak atas pangan yang menjunjung tinggi prinsip pangan sesuai dengan budaya lokal dan Masyarakat Adat yang berdasarkan prinsip kemandirian.

Sejauh ini, dukungan dari AMAN dan PEREMPUAN AMAN untuk kami, adalah upaya-upaya terkait pemenuhan pangan di masa Covid-19.

Anggota PHKom PEEREMPUAN AMAN Montong Baan yang juga bekerja sebagai ibu rumah tangga, tentu lebih paham dengan kondisi dan kebutuhan dapur. Melalui rapat rutin yang digelar oleh para pengurus, kami memutuskan bahwa pemenuhan dalam jangka pendek tidak hanya menanam padi, tetapi juga lainnya. Kami pun bercocok tanam dengan memanfaatkan halaman rumah dengan media polybag (plastik untuk menyemai tanaman) untuk tanaman sayur.

Saat ini, ribuan polybag yang terisi tanah dan pupuk organik, sudah ditanami cabai, kol, brokoli, tomat, dan lainnya. Semua itu dibagikan ke semua pengurus dan anggota untuk dipelihara sendiri. Dalam beberapa bulan, kami sudah menikmati hasil dan manfaat.

Tidak hanya itu, kami juga mencoba hal baru dengan bertani tanaman porang yang sedang tren sebagai bahan tepung alternatif yang kaya glukomanan. Selain untuk makanan, tanaman umbi-umbian tersebut punya manfaat untuk kosmetik dan memiliki pangsa pasar yang luas. Kami telah menanam dua ribu bibit porang. Pemeliharaannya pun terbilang mudah dan tidak menelan biaya mahal.

Selain bercocok tanam secara komunal, kini PHKom Montong Baan juga memiliki lahan secara individu dengan beragam tanaman dan komoditi.



Proses penanaman bibit tanaman sayur pada polybag.

Sumber foto:
PEREMPUAN AMAN
PHKom Montong Baan.

Ragam kabar terbaru seputar Masyarakat Adat dari berbagai pelosok Nusantara, dapat diikuti lewat Portal Berita AMAN.or.id maupun Podcast Radio Gaung AMAN.



Prioritas Vaksinasi bagi Masyarakat Adat

Oleh Annas Radin Syarif



Vaksinasi dosis pertama bagi Masyarakat Adat Balai Juhu, HST, Kalsel
Sumber foto: Robby Juhu Meratus

Selama periode Maret 2020 hingga Mei 2021, AMAN dan Masyarakat Adat di Indonesia telah melakukan upaya pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 di wilayah adat. AMAN telah membentuk 108 Tim Tanggap Darurat Covid-19 atau #AMANKanCovid19 yang bekerja bersama Masyarakat Adat memastikan penutupan kampung secara sementara (lockdown), ritual tolak bala, karantina bermartabat, pengorganisasian peramu obat tradisional, serta peningkatan produksi pangan selama pandemi. Hingga Mei 2021, strategi tersebut berhasil dan tidak ada laporan kasus Covid-19 di wilayah adat.

Namun, varian baru virus korona menyerang pertahanan Masyarakat Adat. Perkembangan virus baru tersebut lebih cepat menginfeksi atau menulari masyarakat yang ada di kota-kota besar maupun berbagai wilayah-wilayah adat. Secara nasional, angka kematian tertinggi akibat Covid-19 pernah mencapai lebih dari seribu dalam sehari (7/7/2021).

* Penulis adalah Ketua Tanggap Darurat AMAN.

Dorongan Akses Vaksin

Sejak Juni 2021, #AMANKanCovid19 telah melaporkan adanya kasus infeksi dan kematian Covid-19 terhadap Masyarakat Adat di 13 kabupaten dan 10 provinsi di Indonesia, - baik itu daerah pedalaman, pulau kecil, dan perbatasan - termasuk Mahakam Hulu di Kalimantan Timur, Kepulauan Aru di Maluku, Pulau Enggano di Bengkulu, dan lainnya. Salah satu dampak terparah dialami oleh Masyarakat Adat Apau Kayan di Malinau, Kalimantan Utara, di mana dilaporkan terdapat 12 orang meninggal dan sekitar 400 warga terpapar serta mereka di Manggarai Timur, Flores, NTT, di mana sekitar 100 warga terpapar Covid-19. Beberapa kasus kematian terjadi saat isolasi mandiri karena keterbatasan fasilitas kesehatan. Secara umum, sebagian besar Masyarakat Adat yang terpapar, mengalami gejala-gejala mirip penderita Covid-19, seperti demam, flu, batuk, serta hilangnya indera penciuman. Angka pasti terhadap jumlah Masyarakat Adat yang terpapar Covid-19, belum tersedia karena keterbatasan atau ketiadaan fasilitas pemeriksaan dan tracking Covid-19 di wilayah adat.

Melihat fenomena perkembangan Covid-19 yang begitu cepat menjangkiti Masyarakat Adat, maka AMAN mengadakan konsolidasi secara virtual yang melibatkan seluruh staf, kader, dan organisasi sayap pada 10 Juli 2021 lalu untuk menyusun strategi penanganan dampak, khususnya pada gelombang kedua pandemi. Dari konsolidasi tersebut, teridentifikasi kebutuhan mendesak, antara lain:

- melaksanakan aksi tanggap darurat Covid-19 dengan memastikan peralatan medis tersedia dan memadai di wilayah adat, seperti masker, alat pelindung diri (APD), oksigen, dan pangan, terutama bagi Masyarakat Adat yang terancam punah dan kritis pangan;
- mendorong dan memastikan akses imunisasi (vaksinasi) Covid-19 bagi Masyarakat Adat; dan
- menggalakkan produksi dan penggunaan ramuan tradisional penguat imun.



Pada saat itu, salah satu kendala Masyarakat Adat mengakses vaksin, adalah persyaratan administrasi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), di mana terdapat banyak Masyarakat Adat dan kelompok rentan belum memiliki NIK dan terancam tidak dapat mengakses vaksin.

Pada 29 Juli 2021, AMAN bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksin bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan, ikut menandatangani surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan kementerian/lembaga terkait untuk memprioritaskan vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan kelompok rentan. Surat terbuka yang ditandatangani 105 organisasi dan 79 tokoh (individu) tersebut, mendorong pemerintah untuk menghilangkan syarat NIK dalam akses vaksin, melakukan edukasi dan sosialisasi untuk meluruskan kabar bohong atau hoaks, serta memastikan fasilitas pemeriksaan kesehatan awal dan lokasi vaksinasi yang mudah diakses oleh Masyarakat Adat dan kelompok rentan lainnya.

Pada 2 Agustus 2021, AMAN melakukan pertemuan koordinasi vaksin untuk Masyarakat Adat dan kelompok rentan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pertemuan yang diinisiasi oleh Polri itu merupakan respon atas surat terbuka. Selain AMAN, Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) dan HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) yang mewakili kelompok rentan penyandang disabilitas, turut hadir pada pertemuan yang mendiskusikan berbagai tantangan vaksin, mulai dari masalah lokasi, kondisi kesehatan, dan sosialisasi. Pada kesempatan itu, AMAN menyerahkan kepada Polri data 536.539 warga adat yang siap divaksin.

Terkait kendala administrasi, Kemenkes pun telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/III/15242/2021 pada 2 Agustus 2021 agar Masyarakat Adat dan kelompok rentan yang belum memiliki NIK, tetap dapat mengakses vaksin.

Perkembangan Vaksinasi Masyarakat Adat

Selain mendorong prioritas pelaksanaan vaksin bagi Masyarakat Adat di tingkat nasional, AMAN di tingkat daerah dan wilayah juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Polsek/Polres, serta TNI sebagai penyedia vaksin di berbagai daerah. Saat ini, sejumlah Masyarakat Adat yang sudah mendapatkan vaksin, mencakup Masyarakat Adat Sakai, Talang Mamak, dan Bonai di Riau; Masyarakat Adat Anak Dalam Batin IX di Jambi; Masyarakat Adat Baduy dan Kasepuhan Banten Kidul di Lebak, Banten; Masyarakat Adat Osing di Banyuwangi, Jawa Timur; Masyarakat Adat Bayan dan Sasak di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat; Masyarakat Adat Toraya dan Banualemo di Sulawesi Selatan; Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan; Masyarakat Adat Dayak Benuaq di Kutai Barat, Kalimantan Timur; serta Masyarakat Adat Dayak Jawatn dan Taman di Sanggau, Kalimantan Barat. (Data jumlah warga adat yang sudah divaksin sedang dihimpun.)

Sementara itu, banyak Masyarakat Adat yang belum mendapatkan vaksin disebabkan oleh keterbatasan jumlah vaksin di daerah, misalnya di Tana Toraja dan Toraja Utara. Menurut data AMAN Toraya, ada 416.178 orang yang siap vaksin, tapi saat ini baru sekitar 100 ribu saja yang sudah divaksin melalui pihak gereja serta TNI/Polri.

Secara geografis, Masyarakat Adat yang tinggal di lokasi pedalaman dan pulau-pulau kecil, menghadapi tantangan utama terkait jarak lokasi dalam akses vaksin. Komunitas Masyarakat Adat Balai Juhu Dayak Meratus misalnya, mereka harus melintasi hutan di kawasan Pegunungan Meratus untuk bisa mendapat vaksin yang diadakan di Puskesmas Kecamatan Batang Alai Timur di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan.

Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, adalah ruang hidup bagi Masyarakat Adat Dayak Meratus.



"Mereka harus turun ke kecamatan untuk vaksin," ucap Syahliwan dari AMAN HST. "Biasanya, mereka menginap satu malam dulu di hutan, kemudian pagi hari jam 10 jalan lagi, dan sekitar jam enam sore baru sampai." Menurutnya, terdapat 12 orang yang sudah divaksin di sana.

Di sisi lain, banyak pula Masyarakat Adat yang ragu dan takut divaksin karena berbagai hoaks. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah selama ini tidak dapat menepis derasnya berita-berita bohong yang beredar di wilayah adat.

Berdasarkan tantangan yang ada, AMAN pun melakukan langkah-langkah untuk memastikan vaksinasi bagi Masyarakat Adat, meliputi:

- sosialisasi Covid-19 dan vaksinasi menggunakan pendekatan sesuai dengan kondisi sosial-budaya Masyarakat Adat setempat, seperti penggunaan bahasa lokal dan istilah "imunisasi," pelibatan ketua maupun tetua adat dalam sosialisasi, serta kerja sama antar-pihak (kepala desa, tenaga kesehatan, dan tokoh di kampung);
- pemeriksaan kesehatan sebelum dilakukan vaksinasi di kampung-kampung lewat kerja sama dengan tenaga kesehatan, termasuk dokter untuk sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan;
- dorongan vaksin masuk kampung (drive thru) dengan mendekati lokasi sentra vaksinasi agar mudah diakses Masyarakat Adat; dan
- pendampingan pasca-vaksinasi oleh petugas kesehatan untuk memastikan Masyarakat Adat mendapatkan informasi dan penanganan yang tepat jika ada gejala-gejala yang timbul setelah vaksin.



Penyerahan bantuan APD dan masker AMAN Toraya di Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

Ikuti terus perkembangan mengenai kondisi Masyarakat Adat terkait Covid-19, vaksinasi bagi Masyarakat Adat, maupun kerja-kerja Satgas #AMANKanCovid19 melalui Portal Berita AMAN.or.id.



**NUSANTARA
INDIGENOUS
COFFEE**



NIC mempersembahkan kopi-kopi dari para petani adat Nusantara bagi kamu pecinta kafein. Petani-petani smallholder ini tersebar di NTT, Sulsel, Bali, dan Bengkulu, dan akan menyuntikkan semangat dalam secangkir kopi di pagi dan sore harimu.

Kami menyediakan full-washed Arabica dan Robusta green bean, roasted bean, maupun ground coffee yang sesuai dengan kesukaanmu. Kami juga bekerja sama dengan kakak kandung Gerai Nusantara dalam menyediakan goodie bag untuk kebutuhan event kamu dengan sistem PO dan harga terjangkau. Jangan ragu menghubungi kami untuk info tentang paket-paket yang kami punya.

Untuk berbelanja dengan nyaman, silakan kunjungi laman marketplace dan Instagram kami untuk lineup kopi-kopi yang tersedia. Atau, kontak kami untuk menikmati cerita-cerita kopi di kedai kami di Gerai Nusantara Bogor.

Dukung terus produk Masyarakat Adat Nusantara ya!

find us

Kedai: Jl. Jend. Sudirman No.15F, RT.01/RW.03, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 (on appointment only)

 *indigenous_coffee*

 085817808958 – Aji

 *indigenous coffee*

 *indigenoucoffee*



Partisipasi Aktif Masyarakat Adat dalam Program Vaksinasi

Di berbagai pelosok Nusantara, Masyarakat Adat menegaskan antusiasme dan partisipasi aktif dalam mendukung program vaksinasi sebagai upaya menekan penularan virus Covid-19 serta mencapai kekebalan kelompok. Masyarakat Adat pun tidak tinggal diam. Di tengah kesenjangan akses terhadap vaksin, AMAN bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksin bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membuka pusat-pusat pelayanan vaksinasi di daerah-daerah. Kegiatan tersebut bahkan diselenggarakan di kampung.

AMAN bersama Masyarakat Adat di tingkat wilayah, daerah, dan komunitas, juga membangun basis data terhadap warga yang siap divaksin. Sosialisasi tentang apa itu vaksin dan pemeriksaan kesehatan pun dilakukan oleh tenaga kesehatan bersama tokoh adat dan tetua adat. Pendekatan ala Masyarakat Adat, dukungan akses yang memadai, serta kolaborasi antar-pihak, menjadi kunci kesuksesan vaksinasi untuk Masyarakat Adat.



Boy Darakay, Ketua BPH AMAN Aru, mendapatkan vaksin Covid-19.



Masyarakat Adat Osing, Jawa Timur

Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Kegiatan vaksinasi bagi Masyarakat Adat Osing difokuskan di Desa Macan Putih, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Berbondong-bondong Masyarakat Adat hadir untuk divaksin dengan suasana yang kental akan tradisi dan budaya Osing.



Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Masyarakat Adat Sekadau, Kalimantan Barat

Di Desa Mondri, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Masyarakat Adat menyambut kedatangan tenaga kesehatan yang melakukan aksi jemput bola dengan datang ke kampung-kampung dalam penyelenggaraan vaksin.



Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Masyarakat Adat Tajio, Sulawesi Tengah

Di Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, AMAN Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, TNI/Polri, dan berbagai aparat dari pemerintah setempat dalam melakukan kegiatan vaksinasi bagi Komunitas Masyarakat Adat Tajio yang tersebar di 20 Desa.



Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Masyarakat Adat Bone Lemo, Sulawesi Selatan

Sejak Covid-19 melanda Indonesia, Desa Bone Lemo di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu telah dengan sigap melakukan berbagai upaya, termasuk membangun posko khusus, di mana Tim Satgas #AMankanCovid19 terdiri dari perpaduan pemuda adat dan perempuan adat. Warga pun menyambut gembira vaksinasi yang hadir dengan informasi tentang apa itu vaksin dan manfaatnya.



Mari Bergabung di CU Randu!

Istilah "Credit Union" - atau disingkat CU - bukan hal yang baru. CU bukan bank atau pasar uang, melainkan lembaga ekonomi mikro masyarakat dan gerakan ekonomi kerakyatan yang pada prinsipnya sejalan dengan asas-asas dan tujuan koperasi di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, CU pun bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Karakter khas dari CU dapat dilihat dari struktur organisasi, program, dan permodalannya yang berbeda dari koperasi dan lembaga keuangan pada umumnya.

Pada awalnya, CU tercetus pada abad ke-19 di Jerman oleh kelompok petani dan buruh. Dari situ, CU berkembang dan tersebar ke berbagai pelosok dunia. CU mengedepankan prinsip swadaya, setia kawan, pendidikan dan penyadaran, inovasi, serta persatuan. Di Indonesia, AMAN mendirikan Credit Union Pancoran Kehidupan (CU Randu) sebagai badan otonom pada 2013. Meski begitu, keanggotaan tidak terbatas hanya pada Masyarakat Adat atau staf AMAN, melainkan terbuka bagi siapa pun. Selain AMAN, CU Randu juga turut dinisiasi oleh sejumlah organisasi lain. CU Randu pun menerima anggota perorangan dan organisasi atau komunitas, di mana setiap anggota aktif dapat mengakses berbagai manfaat, termasuk menabung dan meminjam uang, serta memahami pengelolaan uang atau modal usaha secara bijak.





Staf CU Randu Efrial Ruliandi mengutarakan apa saja manfaat yang bisa diperoleh dengan bergabung menjadi anggota.

"Ada berbagai manfaat dan keuntungan," ungkapnya Efrial, "di antaranya adalah proses simpan pinjam yang mudah dan terjangkau, sumber pinjaman dengan bunga normal, penyediaan sumber kredit untuk kegunaan usaha yang produktif, serta edukasi untuk mengatur dan mengelola keuangan secara bijak serta hemat." CU Randu juga menyediakan layanan non-keuangan untuk kesejahteraan (pendidikan, kesehatan, ibadah, dan sebagainya) serta untuk jasa pengembangan usaha, seperti pelatihan.

Menurutnya, menjadi anggota CU Randu juga dapat meningkatkan rasa solidaritas yang mungkin tidak akan didapatkan di lembaga keuangan lain.

Di tengah pandemi, operasi CU Randu tetap berjalan dengan sejumlah penyesuaian dan telah memberikan banyak kontribusi kepada para anggotanya. Tabungan dan pinjaman produktif yang bisa diakses anggota pun beragam, mulai dari modal untuk wirausaha, pembelian kendaraan, biaya pendidikan, persalinan, dan sebagainya. "Bila ada anggota yang mengalami kemalangan atau rawat inap di rumah sakit, kita menyiapkan dana solidaritas bagi anggota," lanjut Efrial.

Saat ini, CU Randu memiliki ratusan anggota individu dan puluhan anggota organisasi atau komunitas.

Untuk menjadi anggota, kita hanya perlu mengisi formulir dan melengkapi syarat administrasi lainnya. Bagi calon anggota Masyarakat Adat yang belum memiliki foto atau Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk, CU Randu memberikan toleransi dengan melampirkan tanda tangan dan stempel dari perwakilan kelembagaan adat setempat. Sedangkan untuk anak (di bawah 17 tahun), dapat diikuti lewat Program Keluarga. Setiap calon anggota kemudian diharuskan melakukan pinjaman benih yang dapat diangsur. Setelahnya, ketika telah menjadi anggota, setiap individu maupun organisasi atau komunitas dapat mengakses berbagai layanan CU Randu.



CU RANDU

Untuk informasi lebih lanjut atau pendaftaran menjadi anggota CU Randu, dapat menghubungi :



Kontak:
Efrial Ruliandi
0812 1223 1466
adm.curandu@gmail.com



@cu.randu



CU Randu

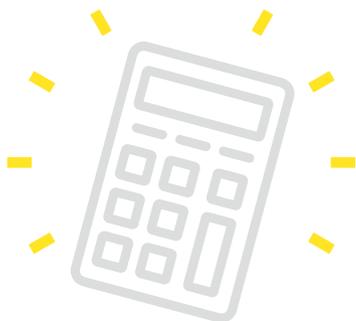


Kantor CU Randu
Jl. Jend. Sudirman 15F Kota
Bogor, Jawa Barat



Laporan Keuangan Tanggap Darurat/Emergency Response (ER) AMAN

Transparansi Publik



<i>Saldo menurut bank Per 31 Desember 2019</i>		504.184.783,76
Tanggal	Sumber Penerimaan	Jumlah
20-Apr-2020	Tamalpais Trust Fund	764.770.500,00
4-May-2020	Pawanka Foundation	439.280.250,00
23-Jun-2020	Tebtebba	209.040.750,00
10-Jul-2020	AVAAZ Foundation	1.061.037.750,00
18-Sep-2020	RFN	712.892.376,00
27-Oct-2020	IFAD	33.960.000,00
16-Dec-2020	Ashden Trust	101.953.500,00
24-Feb-2021	Pawanka Foundation - Wayfinder	8.716.875,00
12-Apr-2021	CLUA	68.122.729,00
27-Jul-2021	SAMDHANA	43.500.000,00
13-Aug-2021	Tamalpais Trust Fund	706.834.950,00
25-Aug-2021	Ashden Trust	773.560.000,00
10-Sep-2021	CLUA	52.968.750,00
22-Oct-2021	Pawanka Foundation	694.346.700,00
Total Dana ER		6.175.169.913,76
Pengeluaran per 25 Oktober 2021		4.515.265.222,23
Sisa dana menurut bank Per 25 Oktober 2021		1.659.904.691,53

Biaya-biaya berupa pembelian APD, logistik, barter, konsumsi staf, Kader, relawan, Unit Tanggap Darurat (UTD) AMAN, pembuatan masker, pembuatan *hand sanitizer*, disinfektan, tempat cuci tangan, publikasi, komunikasi, dan kedaulatan pangan dll. terkait penanggulangan Covid-19 dan dukungan-dukungan tanggap darurat bencana alam, dan lain-lain.

Laporan Iuran Anggota (01 Juli 2021 - 31 Agustus 2021)

Pendapatan Dana	Jumlah
Iuran Anggota Komunitas	
Kampung Tanjung Gusta	480,000.00
Sumbangan	
Sumbangan Rukka S	2,000,000.00
Total	2,480,000.00



LAPORAN KEUANGAN (per 30 Agustus 2021)

Penerimaan Dana terikat Periode hingga Agsutus 2021	
Sumber Penerimaan	Jumlah
Tenure Facility	25.162.056.000,00
Ford Foundation	25.309.840.481,00
Tamalpais	5.729.882.875,00
CLUA	4.162.361.250,00
PACKARD	2.084.763.700,00
HIVOS	871.843.974,85
NIA TERO Foundation	2.919.318.900,00
Rainforest foundation US	252.148.700,00
IFAD	1.058.420.000,00
IWGIA	255.150.000
Pawanka-Wayfinder	709.332.600,00
Saldo	67.805.785.880,85

Sisa Dana per 31 Agustus 2021	
Sumber Penerimaan	Jumlah
Tenure Facility	-
Ford Foundation	5.292.439.589,58
Tamalpais	4.143.205.976,29
CLUA	2.122.836.530,07
PACKARD	-
HIVOS	-
NIA TERO Foundation	850.961.800,18
Rainforest foundation US	252.148.700,00
IFAD	203.174.629,29
IWGIA	240.166.250,00
Pawanka-Wayfinder	709.332.600,00
Saldo	13.104.933.475,41

Penerimaan Dana Tidak Terikat	
Sumber Penerimaan	Jumlah
Dana iuran kader & komunitas Anggota AMAN	111.422.850,59
Donasi (Penggalangan Dana Mandiri)	34.175.078,32

Dana Organisasi per Agustus 2021	
Sumber Penerimaan	Jumlah
Kas	15.000.000,00
Dana Organisasi	364.518.864,00
Dana Resiliancy	2.342.668.689,89
Saldo	2.722.187.553,89

Penerimaan Dana Emergency Respond (ER)	
Sumber Penerimaan	Jumlah
Ashden Trust (ER)	875.513.500,00
AVAAZ Foundation (ER)	1.061.037.750,00
Rainforest Foundation US (ER)	712.892.376
Tebtebba Foundation (ER)	209.040.750
Tamalpais Trust	1.471.605.450
Samdhana (ER)	43.500.000
Dana-dana Program ER	8.716.875
Sisa dana ER per 31 Agustus 2021	1.741.137.212,87

Titipan dana Program 957.992.569,00

Wilayah Adat Adalah Benteng Penyelamat Bumi dari Krisis Iklim

Nusantara kita terdiri dari bermacam suku yang tersebar di ribuan pulau. Di sana, terdapat ribuan komunitas Masyarakat Adat yang hidup dan menjaga wilayah adatnya sebagai ruang hidup. Masyarakat Adat masih menjalankan tradisi dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi secara lestari tanpa merusak bumi yang menjadi rumah kita satu-satunya.

Masyarakat Adat berperan penting dalam menjaga kelestarian bumi. Selama ribuan tahun, Masyarakat Adat telah menjaga bumi dari berbagai bencana ekologi, terutama ketika kini kita menghadapi krisis perubahan iklim akibat keserakahan korporasi dan negara.

Wilayah adat pun bukan hanya ruang hidup Masyarakat Adat, tapi juga benteng pengaman keselamatan kehidupan di planet ini dari marabahaya yang ditimbulkan akibat krisis. Wilayah adat juga penghasil bahan pangan, obat, oksigen, serta rumah bagi ribuan flora dan fauna yang terancam punah.

Kita bisa memulai langkah kecil dengan mendukung Masyarakat Adat untuk terus melestarikan wilayah adatnya, termasuk hutan, bukit, gunung, sungai, dan laut, agar krisis iklim yang melanda ini dapat kita hadapi bersama.

Jadilah DerMA (Dermawan Masyarakat Adat) dengan berdonasi melalui:

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Bank Mandiri KCP Pejaten, Jakarta
No. Rekening: 127-000-657-090-5

Terima kasih telah bersedia berdonasi dan mendukung Masyarakat Adat untuk merawat dan menjaga wilayah adatnya. Keselamatan bumi ada di tangan kita semua.

